

TA 2025

LAPORAN KINERJA

Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera IV



Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat

TA 2025

LAPORAN KINERJA

Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera IV



Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV Tahun 2025 dapat kami selesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP3KP Sumatera IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mendukung pencapaian tugas organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, kami berharap dapat menggambarkan kinerja BP3KP Sumatera IV Tahun 2025 secara transparan dan akuntabel. Harapan kami, kinerja BP3KP Sumatera IV semakin meningkat melalui perbaikan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jambi, Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera IV,



Ir. M. Arifman, S.T., M.M.M.T

NIP. 197509222002121003

KEPALA
BALAI P3KP
SUMATERA IV

IR. M. ARIFMAN S.T, M.T.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025 – 2029 untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV pada Tahun 2025 – 2029 memiliki tujuan secara umum adalah meningkatkan kontribusi pencapaian target Kementerian PKP dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok MBR di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.

Upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak dilakukan melalui:

1. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal (misalnya bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan pembangunan); serta
2. Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan kehandalan infrastruktur dan perumahan rakyat, maka ditetapkan sasaran BP3KP Sumatera IV. Penetapan sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran BP3KP Sumatera IV adalah “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu”, akan dicapai melalui 2 Program, yaitu:

1. **Ketersediaan Rumah Layak Huni**, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni. Sesuai dengan tugas dan fungsi BP3KP Sumatera IV, penyelenggaraan ketersediaan rumah layak huni dilaksanakan dengan 6 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Rumah Susun (Rusun);
 - b. Penyediaan Rumah Khusus (Rusus);
 - c. Penyediaan Rumah Swadaya;
 - d. Penyediaan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - e. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; dan
 - f. Penanganan Sanitasi;

- 2. Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan** Kementerian PKP, merupakan program generik yang ditujukan untuk memastikan optimalisasi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran Programnya adalah meningkatnya dukungan tata Kelola kesekretariatan Kementerian PKP di BP3KP Sumatera IV dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu tingkat Tata Kelola Kesekretariatan.

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV merupakan rumusan dari rancangan rencana strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025 – 2029 yang hendak dicapai. Tujuan BP3KP Sumatera IV secara umum adalah “Meningkatkan kontribusi pencapaian target Kementerian PKP dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu”. Kementerian PKP menyelenggarakan 2 (dua) Program, yaitu:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Program ini memiliki target meningkatkan layanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman. Sesuai dengan tugas dan fungsi, pemenuhan sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kementerian PKP diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - 1) Jumlah rumah susun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Negara Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - 2) Jumlah unit bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan;
 - 3) Jumlah Unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas;
- b. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan, Merupakan program generik yang bertujuan memastikan optimalisasi organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sasaran program ini adalah meningkatnya dukungan manajemen yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Program berupa tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP dan tugas teknis lainnya.

2. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV.

Infrastruktur utama yang dibangun oleh BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 antara lain Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, Pembangunan Rumah Susun (*Multi Years Contract*) dan Penanganan Sanitasi. Dari *output* pembangunan infrastruktur terbangun tersebut diharapkan dapat tercapai *output* dan *outcome* yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar. BP3KP Sumatera IV Memiliki 2 Indikator kegiatan yaitu Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni serta Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Kesekretariatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). BP3KP Sumatera IV mencakup 2 wilayah yaitu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi, Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. 1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Sekretariat Jenderal					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	3 Layanan	3 Layanan	100%
Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja		1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan	3 Laporan	3 Laporan	100%

		Penanganan Kumuh			
	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman		327 Unit	327 Unit	100%
	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja		0,10 Hektar	0,10 Hektar	100%
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		2 Laporan	2 Laporan	100%
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1040 Unit	1037 Unit	99,71%
Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		3 Laporan	3 Laporan	100%
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	0%
	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan		1 Unit	1 Unit	100%
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan		281 Unit	281 Unit	100%

Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera IV

B. Capaian Kinerja lainnya

Selain melaksanakan kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV Tahun 2025, BP3KP Sumatera IV juga melaksanakan dukungan kegiatan lainnya sebagai berikut:

1. Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Klinik PKP hadir sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh pendampingan teknis, informasi pembangunan rumah swadaya, serta akses terhadap program-program bantuan perumahan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Lingkup Pekerjaan Klinik PKP, yaitu:

- Layanan Informasi, berupa penyebarluasan informasi program, kebijakan, dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman.
- Layanan Konsultasi, yaitu pemberian solusi teknis kepada masyarakat secara daring maupun tatap muka terkait pembangunan, perbaikan, pembiayaan dan pemanfaatan rumah.
- Pendampingan dan Bantuan Teknis, meliputi desain, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemilihan bahan bangunan, serta pengawasan pelaksanaan konstruksi rumah swadaya.
- Konsultasi bagi Pemerintah Daerah, mencakup pendampingan penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP).

2. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Dalam rangka mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan ZI secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembenahan internal, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penanaman nilai – nilai integritas kepada seluruh pegawai.

Melalui pelaksanaan pembangunan ZI Tahun Anggaran 2025, BP3KP Sumatera IV telah mencapai berbagai hasil positif yang terukur dan terdokumentasi. Capaian tersebut antara lain meningkatnya kesadaran dan komitmen pegawai terhadap nilai – nilai integritas, tersusunnya dokumen dan sistem pendukung ZI pada enam area perubahan, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja BP3KP Sumatera IV. Selain itu, budaya kerja yang lebih disiplin, transparan, dan akuntabel mulai terbangun di lingkungan BP3KP Sumatera IV, yang tercermin dari meningkatnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), optimalisasi sistem pengawasan internal, serta responsivitas unit kerja dalam menindaklanjuti pengaduan dan masukan masyarakat. Capaian tersebut menjadi modal penting dalam upaya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. Realisasi Anggaran

Dalam merealisasikan komitmen yang telah diperjanjikan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV kepada Direktur seluruh Unit Organisasi (Unor) pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp.43.872.468.000,-. Anggaran yang diperjanjikan oleh Kepala BP3KP Sumatera IV ini dialokasikan untuk Satuan Kerja (Satker) BP3KP Sumatera IV sebesar Rp.3.084.433.000,- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu sebesar Rp.4.801.702.000,- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi sebesar Rp.35.986.333.000,-.

Dalam merealisasikan komitmen yang telah diperjanjikan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV kepada Direktur seluruh Unit Organisasi (Unor) pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp.43.872.468.000,-. Anggaran yang diperjanjikan oleh Kepala BP3KP Sumatera IV ini dialokasikan untuk Satuan Kerja (Satker) BP3KP Sumatera IV sebesar Rp.3.084.433.000,- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu sebesar Rp.4.801.702.000,- Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi sebesar Rp.35.986.333.000,-.

Tabel C. 1 Realisasi Anggaran 2025

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	Satker BP3KP Sumatera IV	3.084.433.000	2.140.639.013	69,40	69,40
2	Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	4.801.702.000	4.703.541.731	97,96	100
3	Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	35.986.333.000	35.281.227.522	98,04	99,71

Sumber: <https://my.pkp.go.id/>

D. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV tidak terlepas dari adanya permasalahan, berikut Gambaran umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja BP3KP Sumatera IV pada tahun 2025:

1. Anggaran BP3KP Sumatera IV pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Ditjen. Perkotaan) tidak ada kegiatan Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan di wilayah

BP3KP Sumatera IV sehingga tidak dapat dilakukan penyerapan anggaran pada paket tersebut.

2. Pada kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jambi terdapat 3 Penerima Bantuan yang mengundurkan diri saat dana bantuan sudah di sampaikan, sehingga dilakukan pengembalian dana ke kas negara akibat hal tersebut dan menyebabkan capaian progress BSPS Provinsi Jambi tidak mencapai 100%.
3. Pada kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jambi terdapat 3 Penerima Bantuan yang mengundurkan diri saat dana bantuan sudah di sampaikan, sehingga dilakukan pengembalian dana ke kas negara akibat hal tersebut dan menyebabkan capaian progress BSPS Provinsi Jambi tidak mencapai 100%.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
COVER.....	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
1.4 Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	6
1.5 Isu Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV	22
1.6 Sistematika Laporan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV	25
2.2 Tujuan	25
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	26
2.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen. KP).....	26
2.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Ditjen. Perdesaan)	28
2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Ditjen. Perkotaan)	29
2.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen. TKPR).....	31
2.3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal (Sekjen).....	33



DAFTAR ISI

2.3.6	Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV	35
2.4	Sasaran Program	36
2.5	Program dan Kegiatan.....	38
2.5.1	Program Teknis	38
2.6.	Perjanjian Kinerja (PK) dan Kronologi Perubahan PK.....	43
2.6.1.	Kronologis Perubahan PK Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal	43
2.6.2.	Kronologis Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen Kawasan Permukiman)	44
2.6.3.	Kronologis Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Ditjen Perumahan Perdesaan).....	45
2.6.4.	Kronologis Perubahan PK Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Ditjen Perumahan Perkotaan).....	46
2.6.5.	Kronologis Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR).....	47
2.7.	Metode Pengukuran Kinerja	48
2.8.	DIPA dan Kronologis Perubahan DIPA.....	49
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	54
3.2	Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV	57
3.2.1.	Capaian Kinerja terhadap PK Sekretariat Jenderal	58
3.2.2.	Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Permukiman	58
3.2.3.	Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Perdesaan	60
3.2.4.	Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Perkotaan	61
3.2.5.	Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen TKPR	62
3.3.	Kinerja Kegiatan Lainnya.....	63

DAFTAR ISI

3.3.1. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rumah Susun, Penanganan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Tahun Anggaran (T.A) 2025.....	64
3.3.2. Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).....	68
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	70
3.4.1. Realisasi Anggaran Pada Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV	70
3.4.2. Rincian Realisasi Anggaran Pada Satuan Kerja (Satker) Balai	76
3.5. Analisis Perbandingan Kinerja.....	82
3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
3.6.2. Analisis Atas Sarana dan Prasarana, serta Anggaran	85
3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja.....	87
3.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan.....	88
3.7.1. Faktor Pendukung Keberhasilan.....	89
3.7.2. Faktor Penyebab Kegagalan	90
BAB IV PENUTUP	92
4.1. Kesimpulan	92
4.1.1. Kendala/Permasalahan dan Saran	93
4.1.2. Terobosan atau Usulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV	95
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	95

DAFTAR TABEL

Tabel C. 1 Realisasi Anggaran 2025.....	X
Tabel 1.4. 1 Status Pendidikan SDM BP3KP Sumatera IV	7
Tabel 1.4. 2 SDM BP3KP Sumatera IV	10
Tabel 1.4. 3 SDM Satker PKP Provinsi Bengkulu	11
Tabel 1.4. 4 SDM Satker PKP Provinsi Jambi.....	12
Tabel 1.4. 5 Sarana Milik BMN BP3KP Sumatera IV	13
Tabel 1.4. 6 Sarana Milik BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu.....	16
Tabel 1.4. 7 Sarana Milik BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi	19
Tabel 2.5.1. 1 Sasaran dan Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	39
Tabel 2.5.1. 2 Target Program Teknis dan Pendanaan BP3KP Sumatera IV Tahun 2025-2029	40
Tabel 2.6.1. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Sekretariat Jenderal	44
Tabel 2.6.2. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen Kawasan Permukiman.....	44
Tabel 2.6.3. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen Perumahan Perdesaan.....	45
Tabel 2.6.4. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen Perumahan Perkotaan.....	46
Tabel 2.6.5. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen TKPR.....	48
Tabel 2.7. 1 Indikator Predikat dan Interpretasi.....	49
Tabel 2.8. 1 Rekapitulasi DIPA pada PK Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera IV.....	50
Tabel 2.8. 2 Rekapitulasi DIPA pada PK Revisi 1 Satuan Kerja Wilayah Sumatera IV	50
Tabel 2.8. 3 Rekapitulasi DIPA pada PK Revisi 2 Satuan Kerja Wilayah Sumatera IV	51
Tabel 3.1. 1 Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BP2P Sumatera IV Tahun 2023.....	54
Tabel 3.1. 2 Uraian Hasil Evaluasi	55
Tabel 3.1. 3 Uraian Rekomendasi.....	56
Tabel 3.2.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Sekretariat Jenderal....	58
Tabel 3.2.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen Kawasan Permukiman	59
Tabel 3.2.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen Kawasan Perdesaan	60
Tabel 3.2.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen Kawasan Perkotaan	61
Tabel 3.2.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen TKPR.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3.1. 1 Capaian Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu	65
Tabel 3.4.2. 1 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Sekretariat Jenderal BP3KP Sumatera IV (691387).....	77
Tabel 3.4.2. 2 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera IV (691441)	78
Tabel 3.4.2. 3 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan BP3KP Sumatera IV (691495)	79
Tabel 3.4.2. 4 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan BP3KP Sumatera IV (691549)	80
Tabel 3.4.2. 5 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen TKPR BP3KP Sumatera IV (691598)	81
Tabel 3.5. 1 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan T.A. 2025 BP3KP Kalimantan I.....	83
Tabel 3.4.1. 1 Realisasi Anggaran Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Wilayah Kerja BP3KP Sumatera IV.....	72
Tabel 3.4.1. 2 BP3KP Sumatera IV DIPA Sekretariat Jenderal	73
Tabel 3.4.1. 3 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	74
Tabel 3.4.1. 4 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan	74
Tabel 3.4.1. 5 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	75
Tabel 3.4.1. 6 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen TKPR	76
Tabel 3.7.1. 7 Faktor Pendukung Keberhasilan	89
Tabel 3.7.2. 1 Faktor Penyebab Kegagalan	90
Tabel 4.1.1. 1 Kendala/Permasalahan dan Saran.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV	4
Gambar 1.4. 1 Diagram Persentase SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Gambar 1.4. 2 Diagram Persentase SDM BP3KP Sumatera IV Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Gambar 1.4. 3 Diagram Persentase SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	8
Gambar 1.4. 4 Diagram Persentase SDM Satker PKP Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 1.4. 5 Diagram Persentase SDM Satker PKP Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 2.4. 1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Sumatera IV	37
Gambar 3.3.1. 1 Peta sebaran kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah kerja BP3KP Sumatera IV	64
Gambar 3.3.1. 2 Dokumentasi Kegiatan BSPS di Provinsi Jambi	66
Gambar 3.3.1. 3 Dokumentasi Kegiatan BSPS di Provinsi Jambi	67
Gambar 3.3.1. 4 Dokumentasi Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Provinsi Jambi	67
Gambar 3.3.2. 1 Grafik Rencana Dan Realisasi Kegiatan Klinik PKP BP3KP Sumatera IV periode Juli sampai dengan Desember.....	69
Gambar 3.3.2. 2 Dokumentasi Kegiatan Klinik PKP BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025	70
Gambar 3.5. 1 Grafik Perbandingan Komposisi Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP3KP Sumatera IV dan BP3KP Kalimantan I	84



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian PKP mengamanatkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Unit Organisasi (Unor)/Satuan Kerja (Satker) secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP sendiri dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana Strategis (Renstra);
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja;
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Keenam butir di atas dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BP3KP) Sumatera IV Tahun 2025. Pelaksanaan tugas atau target kinerja telah dituangkan sebelumnya dalam dokumen Renstra Kementerian PKP Tahun 2025 - 2029.

Laporan Kinerja BP3KP Sumatera IV ini menjelaskan realisasi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra BP3KP Sumatera IV Tahun 2025 - 2029, serta menyajikan keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2025.

1.2 Tugas dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah yang

mempunyai tugas membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam melaksanakan pembangunan perumahan serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Berdasarkan Peraturan Menteri PKP Permukiman No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP dan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP, BP3KP Sumatera IV bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen. KP) dan dipimpin oleh Kepala Balai. BP3KP memiliki tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugas BP3KP Sumatera IV menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman; Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;

- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen. KP) berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera IV

BP3KP Sumatera IV dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
- d. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

a. Kepala Balai

Kepala Balai memimpin dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV.

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan
- 2) Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

d. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

1.4 Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan mekanisme sistem kerja melalui tim kerja/kelompok kerja sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing – masing unit organisasi (Unor). Jabatan fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional masing-masing.

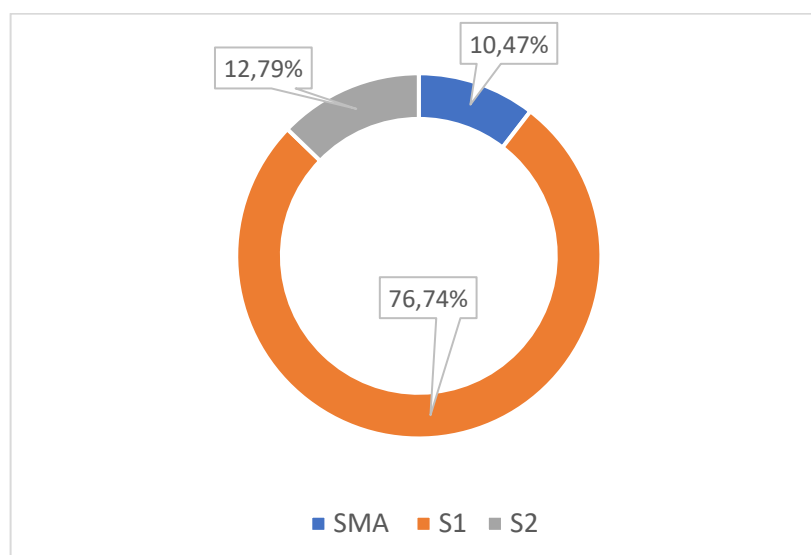
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BP3KP Sumatera IV berjumlah 86 (Delapan Puluh Enam) orang yang terdiri atas 22 (Dua Puluh Dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 38 (Tiga Puluh Delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 25 (Dua Puluh Lima) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1 (Satu) orang NRP. SDM perlu dikelola dengan tuntutan dan kemampuan organisasi agar dapat berjalan seimbang.

Tabel 1.4. 1 Status Pendidikan SDM BP3KP Sumatera IV

STATUS PEGAWAI	JENJANG PENDIDIKAN			TOTAL
	SMA	S1	S2	
PNS	1	10	11	22
PPPK	7	31	-	38
NRP	1	-	-	1
CPNS	-	25	-	25
TOTAL	9	72	11	86

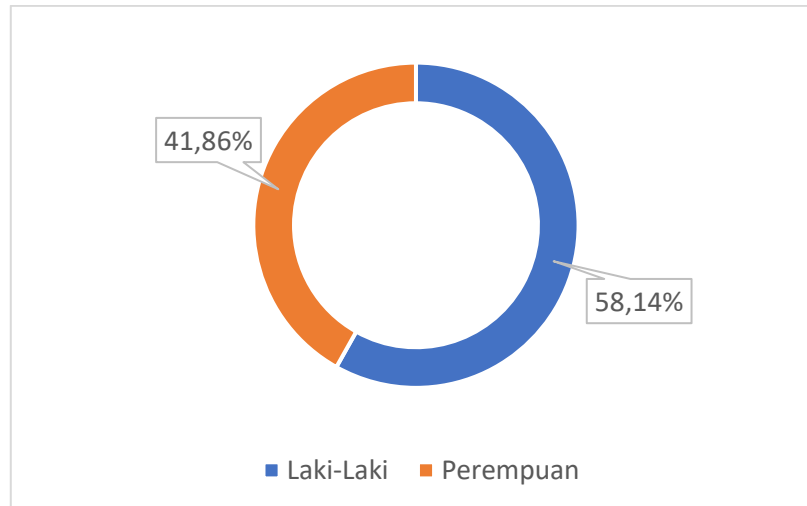
Sumber: Data Internal BP3KP Sumatera IV

Dari total 86 (Delapan Puluh Enam) orang SDM sebanyak 10,47% pegawai berpendidikan SMA Sederajat, 76,74% pegawai berpendidikan S1 Sederajat, 12,79% pegawai berpendidikan S2 Sederajat.



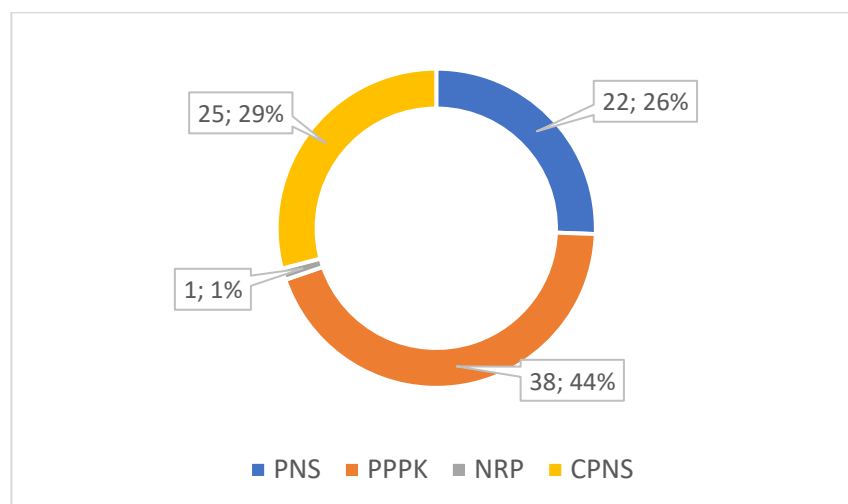
Gambar 1.4. 1 Diagram Persentase SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: Data Internal BP3KP Sumatera IV



Gambar 1.4. 2 Diagram Persentase SDM BP3KP Sumatera IV Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Internal BP3KP Sumatera IV

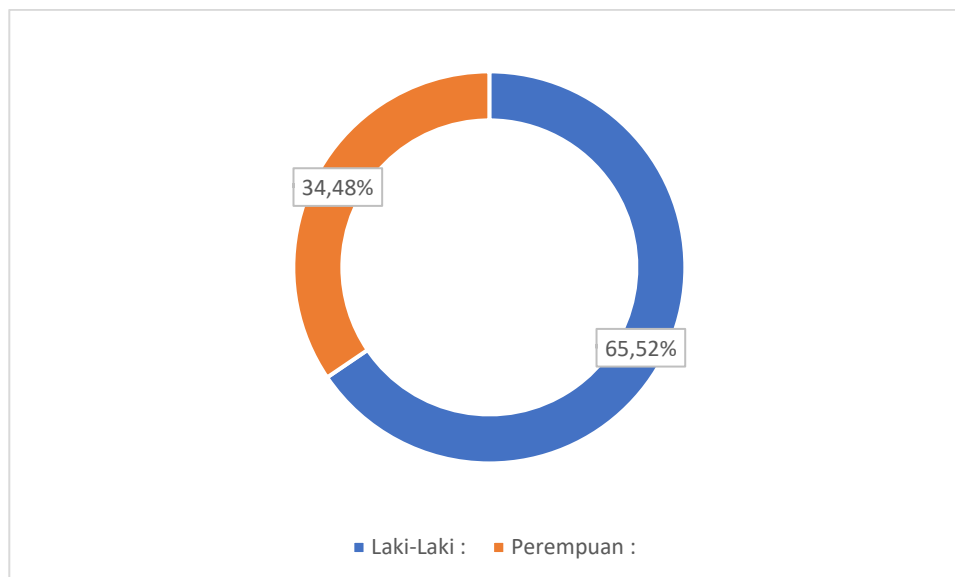


Gambar 1.4. 3 Diagram Persentase SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber: Data Internal BP3KP Sumatera IV

Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin di Satuan Kerja (Satker) PKP Provinsi Bengkulu

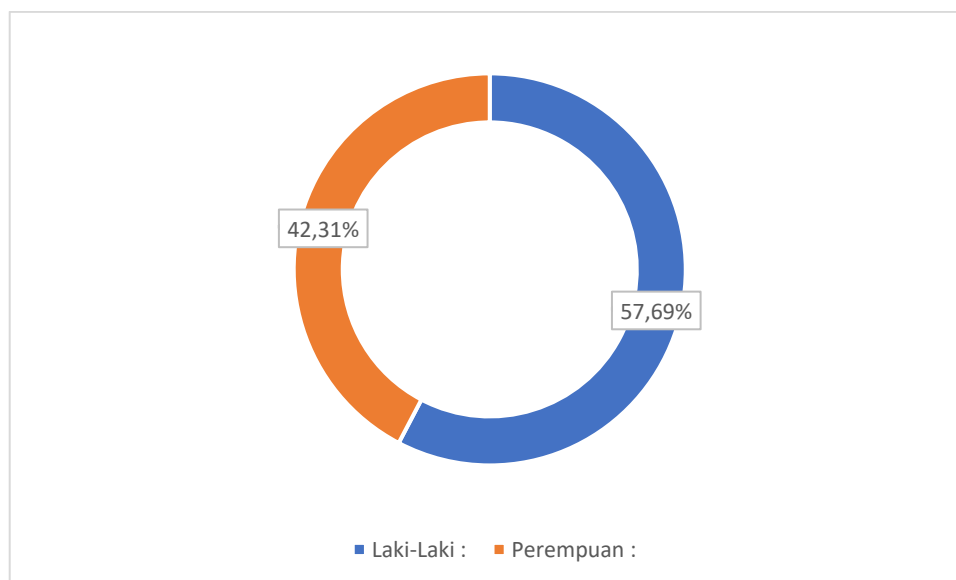
Dari total 29 (Dua Puluh Sembilan) orang SDM di Satker PKP Provinsi Bengkulu, sebanyak 65,52% Laki – Laki dan 34,48% Perempuan.



Gambar 1.4. 4 Diagram Persentase SDM Satker PKP Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin

Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin di Satker PKP Provinsi Jambi

Dari total 26 (Dua Puluh Enam) orang SDM di Satker PKP Provinsi Jambi, Sebanyak 57,69% Laki – laki dan 37,50% Perempuan.



Gambar 1.4. 5 Diagram Persentase SDM Satker PKP Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Jumlah SDM di BP3KP Sumatera IV ada 31 (Tiga Puluh Satu) orang di antaranya 8 (Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (Delapan) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 14 (Empat Belas) orang CPNS dan 1 (Satu) orang NRP.

Tabel 1.4. 2 SDM BP3KP Sumatera IV

No.	Data Pegawai				
	Nama	NIP / NIPPPK / NRP / NIK	Jabatan	Pangkat / Gol	Status
1	2	3	4	5	6
PEGAWAI BP3KP SUMATERA IV					
1	Ir. M. Arifman, S.T., M.M.	19750922 200212 1 003	Kepala Balai	Pembina TK.I / IV.b	PNS
2	Darwani, S.T., M.T.	19750917 201001 1 006	Kasubbag Umum dan TU	Penata TK.I/ III.d	PNS
3	Nurmala, S.T., M.T.	19760611 201001 2 004	Kasi Wilayah I	Pembina / IV.a	PNS
4	Gusman, S.T., M.M.	19690831 200212 1 002	Kasi Wilayah II	Penata / III.d	PNS
5	Widya Setiawati	19791102 200701 2 004	Bendahara	Pengatur TK.I/III.d	PNS
6	Sunarti, S.E., M.M.	19740110 199303 2 001	PPSPM	Penata TK.I/ III.d	PNS
7	Reni Wati, S.T., M.T.	19740604 200604 2 013	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	Penata TK.I/ III.d	PNS
8	Sari Devianti Widyaningrum, S.T.,	19841224 201001 2 014	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	Penata TK.I/ III.d	PNS
9	Anggita Rani Utami, S.Ars	2000063020 250620 18	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
10	Fathoni Athallah, S.Kom	2002091820 250610 02	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
11	Rafly Afif Alfarizy Pane, S.T	1999043020 250610 15	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
12	Abduh Shofii Parinduri, S.T.	1999123120 250610 06	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
13	Heru Fachrizal, S.T	1995052620 250610 04	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
14	Muhammad Iqbal, S.T.	1997081220 250610 09	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
15	Cindy Thalia Bernadet Tumanggor, S.Ars	2002010720 250620 12	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
16	Annisa Arum Kinanti, S.Ars	2002030320 250620 17	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
17	Muhammad Ilham, S.T.	2001052220 250610 03	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
18	Muhammad Rizaldika Noermahmuda, S.P.W.K.	2000112320 250610 09	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
19	Rachmad Hidayat, S.T.	1996122420 250610 12	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
20	Khusnul Khotima, S.Tr.Ak	2001051020 250620 20	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
21	Feni Marlina Warisman, S. Ars.	1997030420 250620 12	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
22	Atika Ferawati, S.Sn.	1995021220 250620 07	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
23	Ahmad Fadly, S. Kom	19931218 202321 1 020	Pranata Komputer Ahli Pertama	IX	PPPK
24	Pietty Nisa, S.E.	19970206 202321 2 022	Arsiparis Ahli Pertama	IX	PPPK
25	Trilliana Wulandari, S.T	19950111 202421 2 008	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	IX	PPPK
26	Agusti Wandura, S.T	19950817 202421 1 010	Penata Kelola Bangunan Gedung & Kawasan	IX	PPPK
27	Anjas Fadhillah, S.T	19991204 202421 1 003	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	IX	PPPK
28	Syena Sapitri, S.E.	19841124 202521 2 033	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	IX	PPPK
29	Akbar Wira Hadikusuma, S.P.	19900724 202521 1 040	Penata Layanan Operasional	IX	PPPK
30	Ely Kurniyati	19760627 202521 2 023	Operator Layanan Perkantoran	-	PPPK
31	Selamet		NRP		NRP

Sumber: Data Internal BP3KP Sumatera IV

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja (Satker) PKP Provinsi Bengkulu

Jumlah SDM di Satker PKP Provinsi Bengkulu (Wilayah I) ada 29 (Dua Puluh Sembilan) orang di antaranya 5 (Lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 (Sembilan Belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 5 (Lima) orang CPNS.

Tabel 1.4. 3 SDM Satker PKP Provinsi Bengkulu

No.	Data Pegawai				
	Nama	NIP/NIPPPK/NRP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol	Status
1	2	3	4	5	6
PEGAWAI SATKER PKP Provinsi Bengkulu					
1	Rinaldi Noeh, S.T.	19700815 2008 12 1 001	Kepala Satuan Kerja	Penata T.K.I/ III.d	PNS
2	Ir. Wahyono, S.H., S.T., M.H., M.E.	19841122 201001 1 012	Penata Kelola Perumahan Ahlin Muda/PPK Rumah Swadaya, PSU dan KP	Penata T.K.I/ III.d	PNS
3	Velly Sospalita, S.E., M.M.	19820529 201001 2 013	Bendahara	Penata T.K.I/ III.d	PNS
4	Titien Devianty, S.ST.Pa	19841218 201001 2 008	PPSPM	Penata T.K.I/ III.d	PNS
5	Retno Wulan Handayani, S.T.	19840428 201101 2 005	Penata Kelola Perumahan Ahlin Muda	Penata T.K.I/ III.d	PNS
6	Insan Prasetya Adipura, S.T.	1996071820 25061008	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
7	Merdi Zuheन्द्र, S.T.	1995030420 25061009	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
8	Cut Athiya Keumala, S.Ars.	1994032820 25062010	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
9	Mia Rahma Gita, S.T.	1998051520 25062014	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
10	Nurhidayah Anggraeni, S.T.	2001030720 25062019	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahlin Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
11	Affan Jauhari, S.E.	1971091320232 1 1 003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahlin	IX	PPPK
12	Akayzeh Dilucet, S.T.	19900514 20242 1 1 005	Penata Kelola Perumahan	IX	PPPK
13	Gemy Revaldo, S.T.	19900303 20242 1 1 005	Penata Kelola Perumahan	IX	PPPK
14	Yoga Amarta Wijaya, S.T.	19890511 20242 1 1 006	Penata Kelola Bangunan Gedung & Kawasan	IX	PPPK
15	Yunita Eka Safutri, S.H.	19910615 20252 1 2 065	Arsipark Ahlin Pertama	IX	PPPK
16	Robian Eni, S. Pt	19830201 20252 1 2 036	Arsipark Ahlin Pertama	IX	PPPK
17	Indriyana Putra Kuddi, S.T.	19910605 20252 1 1 071	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	IX	PPPK
18	Rika Irma Natalana, S.E.	19871225 20252 1 2 057	Penata Layanan Operasional	IX	PPPK
19	Komang Putra Ariyanto, S.T.	19871125 20252 1 1 045	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan	IX	PPPK
20	Kiki Ardianto, S.Si	19910310 20252 1 1 061	Arsipark Ahlin Pertama	IX	PPPK
21	Jerry Febrian Ramadhan, S.H.	19950201 20252 1 1 040	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	IX	PPPK
22	Asmawi, S.TP	19740701 20252 1 1 039	Penata Layanan Operasional	IX	PPPK
23	Dekki Kartika, S.E.	19750323 20252 1 1 026	Penata Layanan Operasional	IX	PPPK
24	Saharman	19700930 20252 1 1 018	Operator Layanan Operasional	V	PPPK
25	Open Effendi	19821020 20252 1 1 051	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	IX	PPPK
26	Fahrul, S.Pi	19890619 20252 1 1 055	Penata Layanan Operasional	IX	PPPK
27	Yofan Karnain	19851208 20252 1 1 046	Operator Layanan Operasional	V	PPPK
28	Eddy Sukma Wijaya	19870129 20252 1 1 036	Pengadministrasian Perkantoran	V	PPPK
29	Septi Kurnia Hayati Rohmah, S.T.	19930926 20242 1 2 018	Penata Kelola Perumahan Ahlin Pertama	IX	PPPK

Sumber: Data Internal Satker PKP Provinsi Bengkulu

c. Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja (Satker) PKP Provinsi Jambi

Jumlah SDM di Satker PKP Provinsi Jambi (Wilayah II) ada 26 (Dua Puluh Enam) orang di antaranya 9 (Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 (Sebelas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 6 (Enam) orang CPNS.

Tabel 1.4. 4 SDM Satker PKP Provinsi Jambi

No.	Data Pegawai				
	Nama	NIP/NIPPPK/NRP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol	Status
1	2	3	4	5	6
PEGAWAI SATKER PKP Provinsi Jambi					
1	Yusra Dwi Yan Safrini, S.T.	198001142008012002	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / Kasat	Penata TK.I/ III.d	PNS
2	Vitalis Vicky Hanggara, S.T., M.C.M	199511132019031004	PPK Rumah Susun	Penata Muda TK.I/III.b	PNS
3	Andri Saribudi Panjaitan, S.T.	198409282010011008	PPK Rumah Swadaya, PSU dan KP	Penata TK.I/ III.d	PNS
4	Eli Sumarni, S.E.	196811122002122003	Bendahara	Penata Muda TK.I/III.b	PNS
5	Windry Eka Yulianti, S.T.	198007262009012007	PPSPM	Penata TK.I/ III.d	PNS
6	Ir. Tambat Yulis, M. M.	196707062000031004	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Pembina TK.I / IV.b	PNS
7	Entety Tradisi Muslim, S.T.	197806202011011003	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	Penata TK.I/ III.d	PNS
8	Sri Winarny, L. S.T.	198101122011012004	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	Penata TK.I/ III.d	PNS
9	Anisa Chandra Kharimah, S.Ars	199601232020122006	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	Penata Muda TK.I/III.b	PNS
10	Nataaniel Cristoven Hia, S.T.	200012132020061009	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
11	Kristine Permata Br Siregar, S.T.	200201052020062010	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
12	Salp Ardo Pratama, S.T.	200010032020061004	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
13	Muzamil Jariski, S.T.	199401212020061004	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
14	Anugerah Ayu Septiani, S.T.	199709152020062012	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
15	Muhammad Ariq Achrida Syam, S.T.	200006172020061009	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	CPNS
16	Pramudia Hamdani, S.T.	199008142023211021	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	IX	PPPK
17	Febtry Pratama, S.T.	199002032023211022	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	IX	PPPK
18	Riska Nofri Yesa, S.T.	199311282024212006	Penata Kelola Bangunan Gedung & Kawasan	IX	PPPK
19	Thiity's Dwi Nofria, S.T	199609302024212017	Penata Kelola Bangunan Gedung & Kawasan	IX	PPPK
20	Aulia Sabrian, S.H.	199011272025211055	Arsipark Ahli Pertama	IX	PPPK
21	Rahmat Mulyadi, S. Kom	199408302025211048	Penata Layanan Operasional	IX	PPPK
22	Amirudin	198307092025211050	Operator Layanan Operasional	V	PPPK
23	Puja Eka Putra	198111152025211048	Operator Layanan Operasional	V	PPPK
24	Weli Sugiat	197906292025212017	Pengadministrasian Perkantoran	V	PPPK
25	Rudi Satria Negara, S.M.	199311062025211060	Penata Layanan Operasional	IX	PPPK
26	Dini Mairuri, S.E.	198302182025212028	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	IX	PPPK

Sumber: Data Internal Satker PKP Provinsi Jambi

d. **Sarana dan Prasarana**

Sarana merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV merupakan aset Barang Milik Negara (BMN). Berikut ini sarana dan prasarana milik BMN BP3KP Sumatera IV per 31 Desember 2025:

Tabel 1.4. 5 Sarana Milik BMN BP3KP Sumatera IV

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	191	725.833.000	0	0	191	725.833.000
3020202003	Kursi Roda	Unit	0	0	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	12	37.200.000	0	0	12	37.200.000
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	1	2.530.000	0	0	1	2.530.000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	1	2.985.000	0	0	1	2.985.000
3050104007	Brankas	Buah	0	0	1	5.180.000	0	0	1	5.180.000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	0	0	6	2.100.000	0	0	6	2.100.000

3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	2	6.870.000	0	0	2	6.870.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	8.000.000	0	0	1	8.000.000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	0	0	1	1.165.000	0	0	1	1.165.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	15	34.500.000	0	0	15	34.500.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	59	79.872.000	0	0	59	79.872.000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	1	6.000.000	0	0	1	6.000.000
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	4	17.720.000	0	0	4	17.720.000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	0	0	1	8.000.000	0	0	1	8.000.000
3050201033	Sofa	set	0	0	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000
3050204001	Lemari Es	Buah	0	0	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	10	55.919.000	0	0	10	55.919.000
3050206002	Televisi	Buah	0	0	4	36.718.000	0	0	4	36.718.000
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	1	4.600.000	0	0	1	4.600.000
3050206058	Gording/Kray	Buah	0	0	35	14.000.000	0	0	35	14.000.000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	0	0	2	2.500.000	0	0	2	2.500.000

3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	1	4.200.000	0	0	1	4.200.000
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	2	33.385.000	0	0	2	33.385.000
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	1	22.000.000	0	0	1	22.000.000
3060102167	Drone	Buah	0	0	1	16.200.000	0	0	1	16.200.000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	1	1.950.000	0	0	1	1.950.000
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	9	215.755.000	0	0	9	215.755.000
3100102009	Tablet PC	Buah	0	0	5	33.500.000	0	0	5	33.500.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	7	29.116.000	0	0	7	29.116.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	2	14.368.000	0	0	2	14.368.000
TOTAL				0		725.833.000		0		725.833.000

Sumber: Data Internal BP3KP Sumatera IV

Tabel 1.4. 6 Sarana Milik BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		602	2.123.688.000	0	0	0	0	602	2.123.688.000
3050101004	Mesin Ketik Listrik	Buah	1	4.000.000	0	0	0	0	1	4.000.000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	5	15.000.000	0	0	0	0	5	15.000.000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	97	299.946.000	0	0	0	0	97	299.946.000
3050104007	Brankas	Buah	1	5.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	6.000.000	0	0	0	0	1	6.000.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	24	79.000.000	0	0	0	0	24	79.000.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	44	61.490.000	0	0	0	0	44	61.490.000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	132	90.842.400	0	0	0	0	132	90.842.400
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	25.000.000	0	0	0	0	2	25.000.000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	88	561.660.000	0	0	0	0	88	561.660.000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	44	41.514.000	0	0	0	0	44	41.514.000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	4	4.000.000	0	0	0	0	4	4.000.000

3050201033	Sofa	set	44	87.912.000	0	0	0	0	44	87.912.000
3050201035	Meja Ruang Tamu	Buah	44	22.710.600	0	0	0	0	44	22.710.600
3050204004	A.C. Split	Buah	7	40.800.000	0	0	0	0	7	40.800.000
3050206002	Televisi	Buah	1	8.000.000	0	0	0	0	1	8.000.000
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	4.600.000	0	0	0	0	1	4.600.000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	4.200.000	0	0	0	0	1	4.200.000
3060102128	Camera Digital	Buah	2	50.000.000	0	0	0	0	2	50.000.000
3060102165	Camera Conference	Buah	2	52.000.000	0	0	0	0	2	52.000.000
3060102167	Drone	Buah	1	30.000.000	0	0	0	0	1	30.000.000
3060105038	GPS Receiver	Buah	2	14.900.000	0	0	0	0	2	14.900.000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	2.500.000	0	0	0	0	1	2.500.000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	1	6.000.000	0	0	0	0	1	6.000.000
3070104108	Kursi Zeis	Buah	2	2.838.000	0	0	0	0	2	2.838.000
3100102001	P.C Unit	Buah	5	75.000.000	0	0	0	0	5	75.000.000
3100102002	Lap Top	Buah	10	246.700.000	0	0	0	0	10	246.700.000
3100102003	Note Book	Buah	14	186.825.000	0	0	0	0	14	186.825.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	65.450.000	0	0	0	0	18	65.450.000

3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	29.800.000	0	0	0	0	3	29.800.000
133111	Gedung dan Bangunan		2	26.091.126.706	0	0	0	0	2	26.091.126.706
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	1	25.548.126.706	0	0	0	0	1	25.548.126.706
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	543.000.000	0	0	0	0	1	543.000.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		45	131.750.000	0	0	0	0	45	131.750.000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2.000.000	0	0	0	0	1	2.000.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	5	2.000.000	0	0	0	0	5	2.000.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	10	11.500.000	0	0	0	0	10	11.500.000
3050204004	A.C. Split	Buah	1	6.000.000	0	0	0	0	1	6.000.000
3060102128	Camera Digital	Buah	2	8.500.000	0	0	0	0	2	8.500.000
3060105038	GPS Receiver	Buah	1	4.500.000	0	0	0	0	1	4.500.000
3100102003	Note Book	Buah	7	51.400.000	0	0	0	0	7	51.400.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	45.850.000	0	0	0	0	18	45.850.000
TOTAL				28.346.564.706		0		0		28.346.564.706

Sumber: Data Internal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu

Tabel 1.4. 7 Sarana Milik BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		0	0	119	611.905.600	0	0	119	611.905.600
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	0	0	3	9.000.000	0	0	3	9.000.000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	5	12.300.000	0	0	5	12.300.000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	0	0	5	18.185.200	0	0	5	18.185.200
3050104007	Brankas	Buah	0	0	1	4.900.500	0	0	1	4.900.500
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	0	0	1	17.000.000	0	0	1	17.000.000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	1.750.000	0	0	1	1.750.000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	4.950.000	0	0	1	4.950.000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	7.375.500	0	0	1	7.375.500
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	32	96.250.000	0	0	32	96.250.000

3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	36	69.500.000	0	0	36	69.500.000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	4	6.800.000	0	0	4	6.800.000
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	2	15.490.000	0	0	2	15.490.000
3050201033	Sofa	set	0	0	1	5.300.000	0	0	1	5.300.000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	6	34.000.000	0	0	6	34.000.000
3050206002	Televisi	Buah	0	0	1	6.484.500	0	0	1	6.484.500
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	1	3.930.300	0	0	1	3.930.300
3060102167	Drone	Buah	0	0	2	56.243.000	0	0	2	56.243.000
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	1	1.436.600	0	0	1	1.436.600
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	10	219.510.000	0	0	10	219.510.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	2	6.900.000	0	0	2	6.900.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	1	7.600.000	0	0	1	7.600.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	19	114.864.000	0	0	19	114.864.000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	1	8.800.000	0	0	1	8.800.000

3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	3	5.250.000	0	0	3	5.250.000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	1	1.196.000	0	0	1	1.196.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	3	7.500.000	0	0	3	7.500.000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	1	2.805.000	0	0	1	2.805.000
3050201008	Meja Rapat	Buah	0	0	1	10.989.000	0	0	1	10.989.000
3050204004	A.C. Split	Buah	0	0	2	9.600.000	0	0	2	9.600.000
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	5	49.775.000	0	0	5	49.775.000
3100102003	Note Book	Buah	0	0	1	15.499.000	0	0	1	15.499.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	1	3.450.000	0	0	1	3.450.000
TOTAL			0			726.769.600		0		726.769.600

Sumber: Data Internal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi

1.5 Isu Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Isu strategis adalah informasi atas kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan/atau perumusan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pusat khususnya dimasa yang akan datang.

Berikut isu strategi yang dihadapi oleh BP3KP Sumatera IV sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan perencanaan yang komperhensif.
- b. Kurangnya tingkat kepedulian pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RP3KP.
- c. Meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan.
- d. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat.
- e. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan.
- f. Kurang terintegrasinya upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan.
- g. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis.

1.6 Sistematika Laporan

Penyajian Sistematika Laporan pada Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategi, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi BP3KP Sumatera IV.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Rencana Strategi (Renstra) Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV 2025 – 2029, PK tahun 2025 dan target tahun 2025 menurut Renstra.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV tahun 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang Upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, Analisa perbandingan kinerja, Analisa realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, factor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Daftar Penghargaan yang diperoleh, metode pengukuran kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita. Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025 – 2029, Kementerian menjadi penyokong utama Asta Cita 6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan” yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025 – 2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian juga mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

Renstra Kementerian PKP ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

2.2 Tujuan

Tujuan pertama adalah “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”. Tujuan pertama ini memiliki indikator:

- a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
- b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
- c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
- d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
- e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
- f. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
- g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;

- h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
- i. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
- j. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

Tujuan kedua adalah “Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

2.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen. KP)

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan dengan menerapkan strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - 2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - 3) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - 4) Penyediaan Prasarana, Saranan, dan Utilitas (PSU) pada hunian tapak dan vertikal.
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan strategi:

- 1) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - 2) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - 3) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.
- d. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi:
- 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2) Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - 3) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - 5) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
 - 6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Ditjen. Perdesaan)

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan strategi:
 - 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan;
 - 4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - 5) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
- b. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif, dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - 2) Pengembangan skema tabungan berencana;
 - 3) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - 4) Pengembangan skema Kredit Renovasi Rumah (KRR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR);
 - 5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - 6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
- c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi, dengan strategi:
 - 1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;

- 2) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - 3) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - 4) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 5) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 6) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 7) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - 5) Penguatan kelembagaan.

2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Ditjen. Perkotaan)

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:

- 1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - 2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - 3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - 4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD.
- c. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
- d. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - 2) Kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - 3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - v. Penguatan kelembagaan.
- e. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan

- strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.
- f. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
 - g. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah.
 - h. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

2.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen. TKPR)

- a. Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
- b. Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran

melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema terjangkau di Indonesia (Indonesia Green Affordable Housing Program atau IGAHP).
 - 2) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain.
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrian perumahan.
 - 4) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
- d. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya, dengan strategi sebagai berikut:
- 1) *Governance*, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko;
 - 2) Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko;
 - 3) Compliance, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- 4) Financing, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

2.3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal (Sekjen)

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - 1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - 2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - 1) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - 2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui strategi:
 - 1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi;
 - 2) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
- d. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
 - 1) Sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan

- 2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-based policy).
- e. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
 - 1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - 2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan ke humasan secara profesional dan responsif.
- f. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
 - 1) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - 2) Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- g. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui strategi:
 - 1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - 2) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
 - 1) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan
 - 2) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem *e – Procurement* untuk efisiensi dan transparansi.
- i. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
 - 1) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - 2) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:

- 1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan
- 2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

2.3.6 Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Sejalan dengan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020 – 20245, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 2025 – 2029, dan Renstra dari masing – masing Unit Organisasi (Unor) (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), arah kebijakan penyelenggaraan perumahan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini BP3KP Sumatera IV meneruskan dari rumusan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik. Dengan pendekatan menyeluruh, Program Pembangunan dan Renovasi 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan

permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

BP3KP Sumatera IV melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung rumusan target Kementerian PKP yaitu sebagai berikut:

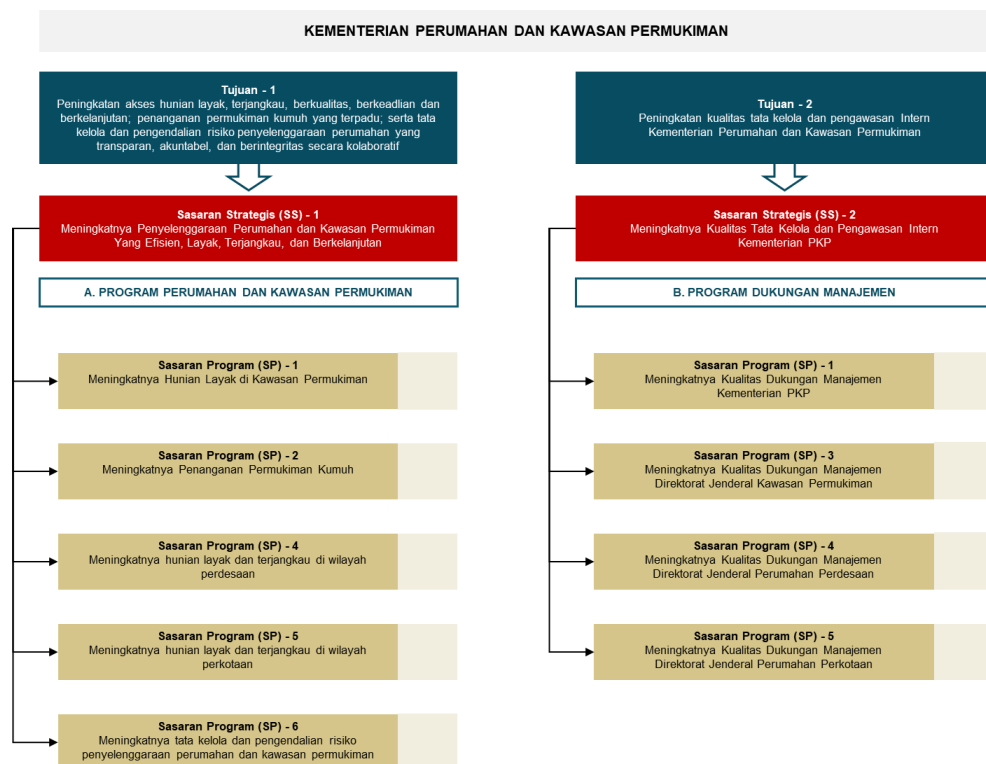
- a. Pembangunan Rumah Baru berupa Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus baik di wilayah Perdesaan maupun Perkotaan;
- b. Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan Penyediaan Sanitasi Layak di wilayah Perdesaan maupun Perkotaan;
- c. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan pada hunian tapak dan/vertikal di wilayah perdesaan maupun perkotaan;
- d. Peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah perdesaan maupun perkotaan; Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan, termasuk melalui program CSR dan TJSL, untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Tiga Juta Rumah.

2.4 Sasaran Program

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan dari Tujuan Kementerian yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran program yang akan dilaksanakan oleh setiap Unit Organisasi (Unor) hingga pada unit kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian PKP periode 2025 – 2029, yaitu:

- a. Sasaran strategis (SS) – 1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:
 - 1) SP–1: Meningkatkan Hunian Layak di Kawasan Permukiman;
 - 2) SP–2: Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh;
 - 3) SP–3: Meningkatkan Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak;
 - 4) SP–4: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah
 - 5) SP–5: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan;

- 6) SP-6: Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Sasaran strategis (SS) – 2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:
- 1) SP-1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP;
 - 2) SP-2: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
 - 3) SP-3: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
 - 4) SP-4: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
 - 5) SP-5: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
 - 6) SP-6: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
 - 7) SP-7: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Gambar 2.4. 1 Pohon Kinerja Sasaran Program BP3KP Sumatera IV

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV melaksanakan kegiatan dengan mengintervensi beberapa Sasaran Program sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.4. 1. Adapun Sasaran Program dari Kementerian PKP yang diintervensi yaitu Sasaran Program SP-1, SP-2, SP-4, SP- 5, dan SP-6 yang diturunkan dari Sasaran Strategis-1 atau Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Sasaran Program SP-1, SP-3, SP-4, dan SP-5 yang diturunkan dari Sasaran Strategis-2 atau Program Dukungan Manajemen.

2.5 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Bidang Perumahan maka ditetapkan Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV. Penetapan sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. **Sasaran Strategis (SS) BP3KP Sumatera IV adalah “Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”** yang akan dicapai melalui 2 Program, yaitu:

2.5.1 Program Teknis

Program teknis yaitu program-program Kementerian/ Unit Organisasi (Unor)/Unit Kerja (Unker) yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Pada bidang perumahan ditetapkan Program teknis **Perumahan dan Kawasan Permukiman** dengan sasaran program **“Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni”**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV, penyelenggaraan ketersediaan rumah layak huni dilaksanakan dengan 8 kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
- b. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
- c. Pembangunan Rumah Susun;
- d. Pemeliharaan Rumah Susun;
- e. Penyediaan Rumah Khusus;
- f. Pemeliharaan Rumah Khusus;

- g. Fasilitasi Bantuan PSU bagi Rumah Umum;
- h. Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko.

Tabel 2.5.1. 1 Sasaran dan Indikator Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN	INDIKATOR	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau di Provinsi Bengkulu	
Sasaran Program	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman layak huni di Provinsi Bengkulu	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusun Perencanaan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun 4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun 6. Jumlah Rumah Umum yang mendapat fasilitasi Layanan Bantuan PSU

Tabel 2.5.1. 2 Target Program Teknis dan Pendanaan BP3KP Sumatera IV Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM <i>OUTCOME</i> /SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen		-	1	1	1	1	4
	3	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4
	4	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4
	7	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	1	1	1	1	4
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum										
OUTPUT KEGIATAN:										
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		-	669	669	669	669	2,676
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	-	1	1	1	3
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan	Dokumen		-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4

KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	1,098	8,007	8,007	8,007	8,007	33,126	
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		593	593	593	593	2,372	
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	32	88	88	88	88	384	
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	
5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	
6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	
8	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	
2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar							

KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar							
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	9	
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV									
OUTPUT KEGIATAN:									
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	
2	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Dari tabel dan uraian di atas target fisik renstra tahun 2025 berdasarkan renstra tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman 1 Rekomendasi Kebijakan.
- b. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman 1 Laporan.
- c. Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan 1 Kegiatan.
- d. Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum 0 Unit.
- e. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyiapan lahan dan PSU kawasan permukiman 1 Laporan.
- f. Jumlah unit rumah swadaya 1098 Unit.
- g. Jumlah rumah susun yang terbangun 32 Unit.
- h. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu 0 Hektar.
- i. Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas 1 Rekomendasi Kebijakan.
- j. Jumlah Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 1 Rekomendasi Kebijakan.
- k. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan.

2.6. Perjanjian Kinerja (PK) dan Kronologi Perubahan PK

2.6.1. Kronologis Perubahan PK Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal

PK DIPA Sekretariat Jenderal ditanda tangani oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Terdapat satu PK yang mengalami dua kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6.1 1.

Tabel 2.6.1. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK Awal	1 Juli 2025	3 layanan	Total Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 1.561.666.000,-
PK Revisi 1	31 Oktober 2025	3 layanan	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV dengan total 1.890.386.000,-
PK Revisi 2	13 November 2025	3 layanan	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV dengan total 2.209.986.000,-
PK Akhir	10 Desember 2025	3 layanan	Pagu akhir APBN BP3KP Sumatera IV adalah 2.209.986.000,-

Sumber: Data PK BP3KP Sumatera IV

2.6.2. Kronologis Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen Kawasan Permukiman)

PK DIPA Ditjen Kawasan Permukiman ditanda tangani Kepala BP3KP Sumatera IV dan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Terdapat satu PK yang mengalami dua kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6.2. 1.

Tabel 2.6.2. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK Awal	13 September 2025	2 Laporan 3 Laporan 286 Unit Rumah Swadaya	Total Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 7.142.924.000, -

PK Revisi I	8 Oktober 2025	2 Laporan 3 Laporan 286 Unit Rumah Swadaya 0.10 hektar peningkatan kualitas	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu menjadi 8.601.428.000, -
PK Akhir	10 Desember 2025	2 Laporan 3 Laporan 286 Unit Rumah Swadaya 0.10 hektar peningkatan kualitas	Pagu akhir APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 8.601.428.000, -

Sumber: Data PK BP3KP Sumatera IV

2.6.3. Kronologis Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Ditjen Perumahan Perdesaan)

PK DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan ditanda tangani oleh Kepala BP3KP Sumatera IV dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan. Terdapat satu PK yang mengalami dua kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6.3. 1.

Tabel 2.6.3. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK Awal	4 Juli 2025	1 Kegiatan 2 Laporan	Total Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 390.322.000,-
PK Revisi I	21 Agustus 2025	1 Kegiatan 2 Laporan 1708 Unit BPS	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu menjadi

			23.608.254.000 .000, -
PK Revisi 2	24 Oktober 2025	1 Kegiatan 2 Laporan 1040 Unit BSPS	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu menjadi 23.060.206.000, -
PK Akhir	10 Desember 2025	1 Kegiatan 2 Laporan 1040 Unit BSPS	Pagu akhir APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 23.060.206.000, -

Sumber: Data PK BP3KP Sumatera IV

2.6.4. Kronologis Perubahan PK Pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Ditjen Perumahan Perkotaan)

PK DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan ditanda tangani oleh Kepala BP3KP Sumatera IV dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan. Terdapat satu PK yang mengalami tiga kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6.4.1.

Tabel 2.6.4. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK Awal	1 Agustus 2025	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Unit BSPS	Total Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 426.902.000,-
PK Revisi I	9 Agustus 2025	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Unit BSPS	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu menjadi

			2.121.871.000
PK Revisi 2	25 Agustus 2025	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 284 Unit BSPS	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu menjadi 8.405.784.000,-
PK Revisi 3	8 Oktober 2025	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Unit Rusun ASN/TNI/POLRI 284 Unit BSPS	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu menjadi 9.758.015.000,-
PK Revisi 4	17 Oktober 2025	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Unit Rusun ASN/TNI/POLRI 281 Unit BSPS	Penambahan Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu menjadi 9.697.382.000,-
PK Akhir	10 Desember 2025	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Unit Rusun ASN/TNI/POLRI 281 Unit BSPS	Pagu akhir APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 9.697.382.000,-

Sumber: Data PK BP3KP Sumatera IV

2.6.5. Kronologis Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR)

PK DIPA Ditjen TKPR ditanda tangani oleh Kepala BP3KP Sumatera IV dan Ditjen TKPR. Terdapat satu PK yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6.5.1.

Tabel 2.6.5. 1 Kronologis Perubahan PK Pada Ditjen TKPR

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Target	Uraian
PK	24 Juni 2025	2 Rekomendasi	Total Pagu APBN BP3KP Sumatera IV, Satker Jambi dan Satker Bengkulu adalah 303.466.000-

2.7. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV. Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat, dan dampak.

Penilaian ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting serta berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Metode pengukuran yang digunakan BP3KP Sumatera IV dalam menyusun Laporan Kinerja BP3KP Sumatera IV adalah sebagai berikut:

- Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\% \text{ Target Pencapaian} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

Selain itu, penilaian target kinerja juga melalui hasil evaluasi laporan kinerja yang berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB RI) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat dan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 2.7. 1 Indikator Predikat dan Interpretasi

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90–100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60-70)	Baik
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai)
C (Nilai > 30-50)	Kurang
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang

Metode Pengukuran Kinerja yang pertama dilakukan dengan membandingkan antara *output* capaian 2025 terhadap target kinerja yang tertuang dalam PK akhir tahun 2025 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja dengan angka satuan persentase.

2.8. DIPA dan Kronologis Perubahan DIPA

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengoperasionalkan perencanaan kinerja instansi pemerintah. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), DIPA memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.

Pembahasan DIPA dalam Laporan Kinerja Tahunan ini disusun untuk menilai tingkat keselarasan antara alokasi anggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk menggambarkan realisasi anggaran dan

capaian kinerja atas output dan outcome yang dihasilkan. Analisis ini menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran instansi. Melalui pembahasan DIPA yang terintegrasi dalam kerangka SAKIP, diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif sebagai dasar evaluasi kinerja, perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan hasil (*result oriented*).

Tabel 2.8. 1 Rekapitulasi DIPA pada PK Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera IV

No	DIPA PK AWAL	BP3KP Sumatera IV	Satker Bengkulu	Satker Jambi
1	Sekretariat Jenderal	Rp.837.518.000,00	Rp.396.527.000,00	Rp.327.621.000,00
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp.464.610.000,00	Rp.1.513.383.000,00	Rp.5.164.931.000,00
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp.171.176.000,00	Rp.111.627.000,00	Rp.107.519.000,00
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp.220.356.000,00	Rp.102.125.000,00	Rp.104.421.000,00
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi	Rp.303.466.000,00	-	-

Tabel 2.8. 2 Rekapitulasi DIPA pada PK Revisi 1 Satuan Kerja Wilayah Sumatera IV

No	DIPA PK Revisi 1	BP3KP Sumatera IV	Satker Bengkulu	Satker Jambi
1	Sekretariat Jenderal	Rp.837.518.000,00	Rp.540.711.000,00	Rp.512.157.000,00
2	Direktorat Jenderal	Rp.464.610.000,00	Rp.2.105.670.000,00	Rp.6.031.148.000,00

	Kawasan Permukiman			
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp.171.176.000,00	Rp.111.627.000,00	Rp.23.325.451.000,00
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp.1.071.367.000,00	Rp.524.104.000,00	Rp.526.400.000,00
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi	-	-	-

Tabel 2.8. 3 Rekapitulasi DIPA pada PK Revisi 2 Satuan Kerja Wilayah Sumatera IV

No	DIPA PK Revisi 2	BP3KP Sumatera IV	Satker Bengkulu	Satker Jambi
1	Sekretariat Jenderal	Rp.935.918.000,00	Rp.625.831.000,00	Rp.512.157.000,00
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	-	-	-
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp.309.072.000,00	Rp.111.627.000,00	Rp.22.639.507.000,00
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp.1.071.367.000,00	Rp.1.958.574.000,00	Rp.5.375.843.000,00
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi	-	-	-

Tabel 2.8. 4 Rekapitulasi DIPA pada PK Akhir Satuan Kerja Wilayah Sumatera IV

No	DIPA PK Akhir	BP3KP Sumatera IV	Satker Bengkulu	Satker Jambi
1	Sekretariat Jenderal	Rp.935.918.000,00	Rp.625.831.000,00	Rp.512.157.000,00
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp.464.610.000,00	Rp.2.105.670.000,00	Rp.6.031.148.000,00
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp.309.072.000,00	Rp.111.627.000,00	Rp.22.639.507.000,00
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp.1.071.367.000,00	Rp.1.958.574.000,00	Rp.5.375.843.000,00
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi	Rp.303.466.000,00	-	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV merupakan Unit Pelaksana Teknis yang sejak tahun 2025 berada di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perubahan ini merupakan penyesuaian nomenklatur dari unit sebelumnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera IV yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai Kementerian yang baru terbentuk, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2025 di tingkat Balai maupun Satuan Kerja. Hal ini merupakan dampak dari proses transisi dan penyesuaian kelembagaan kementerian, termasuk penyesuaian regulasi serta kebijakan pendukung lainnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan peningkatan akuntabilitas kinerja pada dokumen ini masih mengacu pada hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 sebagai dasar analisis.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi atas AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Tahun 2023 dapat dikategorikan A (Memuaskan), yang menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai pada level eselon IV/pengawas, dengan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.1. 1 Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BP2P Sumatera IV Tahun 2023

No	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60

3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	82,00

Belum tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/sub komponen AKIP sebagai berikut.

Tabel 3.1. 2 Uraian Hasil Evaluasi

No	Komponen/Sub Komponen	Permasalahan
1	Perencanaan Kinerja	
a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	Balai telah memenuhi seluruh kriteria, tetapi baru dipertahankan selama 4 tahun (sejak Tahun 2020).
b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>).	Balai telah memenuhi seluruh kriteria, tetapi belum ada inovasi dari pemenuhan kriteria tersebut.
c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Balai belum mendokumentasikan seluruh bukti keterlibatan pimpinan dalam penyempurnaan/perbaikan dokumen perencanaan kinerja.
2	Pengukuran Kinerja	
a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan.	Balai belum mencantumkan cara mengukur setiap indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis.
b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja efektif dan efisien serta dilakukan berjenjang dan berkelanjutan.	Balai belum menyajikan capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dalam Laporan Monev Kinerja Bulanan.
c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment serta penyesuaian strategi.	Balai telah memenuhi seluruh kriteria, tetapi belum ada inovasi dari pemenuhan kriteria tersebut.

3	Pelaporan Kinerja	
a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.	Balai telah memenuhi seluruh kriteria, tetapi baru dipertahankan selama 4 tahun (sejak Tahun 2020).
b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar kualitas pencapaian, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan.	Balai telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan baik (sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018).
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan.	Balai belum melakukan kaderisasi/melibatkan pegawai lainnya untuk mengikuti Bimtek atau Evaluasi kegiatan terkait SAKIP.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.	Tidak terdapat permasalahan, seluruh kriteria telah terpenuhi.
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan SDM memadai.	Balai telah memenuhi seluruh kriteria, tetapi belum ada inovasi dari pemenuhan kriteria tersebut.
c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.	Balai telah menyajikan informasi mengenai efisiensi anggaran pada Laporan Kinerja tahun 2023, namun belum menyajikan efisiensi anggaran pada Laporan Kinerja Tahun 2022.

Dari permasalahan diatas dapat direkomendasikan perbaikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. 3 Uraian Rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	Balai perlu mendokumentasikan setiap arahan/koreksi pimpinan dalam penyempurnaan/perbaikan dokumen perencanaan kinerja.
2	Pengukuran Kinerja	a. Balai perlu mencantumkan cara mengukur setiap indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis. b. Balai perlu menyajikan capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dalam Laporan Monev Kinerja Bulanan.
3	Pelaporan Kinerja	Balai perlu mengikutsertakan pegawai lainnya untuk mengikuti Bimtek/Workshop/Evaluasi

		kegiatan yang berkaitan dengan SAKIP.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Balai perlu menyajikan informasi mengenai efisiensi anggaran pada Laporan Kinerja selanjutnya.

3.2 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV

Laporan Kinerja BP3KP Sumatera IV Tahun 2025 memuat hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Pengukuran tersebut mengacu pada sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan menggunakan Perjanjian Kinerja revisi akhir sebagai dasar penilaian capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban BP3KP Sumatera IV atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam struktur organisasi kementerian, BP3KP Sumatera IV berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas pada 5 (lima) Unit Organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Seluruh kegiatan di lingkungan BP3KP Sumatera IV dilaksanakan dalam rangka mendukung dua program utama, yaitu:

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- Program Dukungan Manajemen.

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dialokasikan melalui DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen dialokasikan melalui DIPA Sekretariat Jenderal.

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dialokasikan melalui DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen dialokasikan melalui DIPA Sekretariat Jenderal.

3.2.1. Capaian Kinerja terhadap PK Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera IV yang bersumber dari DIPA Sekretariat Jenderal menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan, yaitu “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal.” Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yakni Tingkat Layanan Dukungan Manajemen, dengan target sebanyak 3 (tiga) layanan.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja atas kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal pada BP3KP Sumatera IV terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.2.1. 1.

Tabel 3.2.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Sekretariat Jenderal					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	3 Layanan	3 Layanan	100%

3.2.2. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera IV yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

- Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;

- b. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman; dan
- c. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.

Masing – masing sasaran kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang terukur dan melekat sebagai dasar evaluasi capaian. Pada Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman pada BP3KP Sumatera IV mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.2.2.1.

Tabel 3.2.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, ke mitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan	3 Laporan	100%
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	327 Unit	327 Unit	100%

		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	0,10 Hektar	0,10 Hektar	100%
--	--	---	-------------	-------------	------

3.2.3. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Perdesaan

Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera IV yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

- Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan;
- Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan; dan

Setiap sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran capaian. Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat satu indikator yang belum mencapai target maksimal, yaitu Indikator Jumlah Unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan dengan capaian 99,71%. Rincian capaian kinerja selengkapnya disajikan pada Tabel 3.2.3.1.

Tabel 3.2.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen Kawasan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan					
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah kegiatan Koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan	2 Laporan	100%

2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1040 Unit	1037 Unit	99,71%
---	--	--	-----------	-----------	--------

3.2.4. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen Kawasan Perkotaan

Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera IV yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

- Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
- Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan; dan
- Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan.

Setiap sasaran kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian. Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat satu indikator yang belum mencapai target secara maksimal, yaitu Indikator Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan dengan realisasi sebesar 99,79%. Capaian tersebut disebabkan oleh deviasi target kinerja sebesar minus 1 (satu) unit Rumah Swadaya pada salah satu satuan kerja di wilayah BP3KP Sumatera IV, di mana dari target 244 unit yang ditetapkan, terealisasi sebanyak 243 unit.

Secara keseluruhan, capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan pada BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 mencapai 99,81%. Rincian capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.2.4.1.

Tabel 3.2.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen Kawasan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan					
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah laporan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan	3 Laporan	100%
2	Meningkatnya Keterseediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	0%
		Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit	1 Unit	100%
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah unit Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Perkotaan	281 Unit	281 Unit	100%

3.2.5. Capaian Kinerja terhadap PK Ditjen TKPR

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Sumatera IV dengan DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menetapkan dua Sasaran Kegiatan yaitu:

- Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; dan
- Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan masing – masing indikator kinerja yang melekat pada setiap sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025, dengan rincian pada Tabel 3.8.

Tabel 3.2.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV pada PK Ditjen TKPR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%

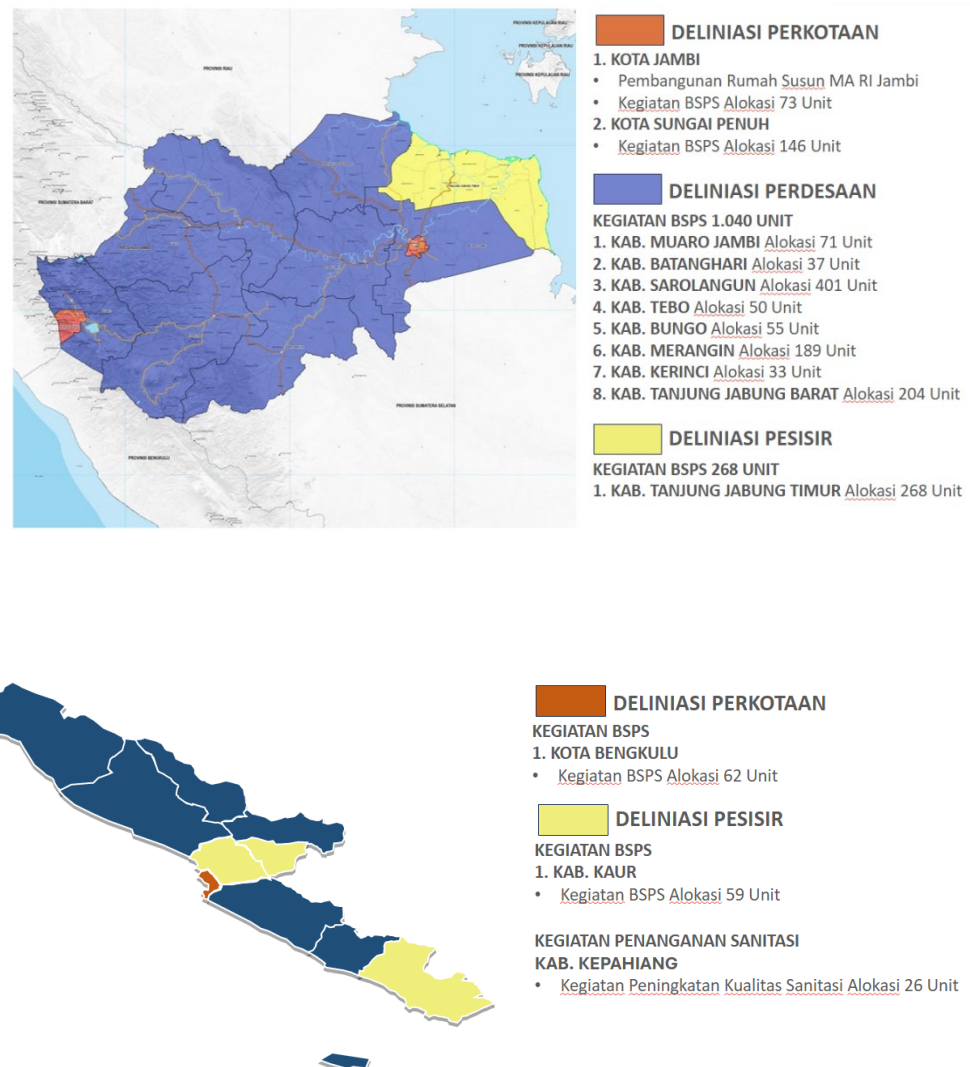
3.3. Kinerja Kegiatan Lainnya

Beberapa pembahasan lain terkait capaian kinerja juga mencakup rincian pelaksanaan kegiatan utama di wilayah kerja BP3KP Sumatera IV yang meliputi Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Antara lain mencakup:

- Sebaran kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rumah Susun (Rusun), penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas sanitasi rumah; dan
- Capaian target layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (Klinik PKP).

3.3.1. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rumah Susun, Penanganan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Tahun Anggaran (T.A) 2025

Peta sebaran kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah kerja BP3KP Sumatera IV dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.3.1. 1 Peta sebaran kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah kerja BP3KP Sumatera IV

Berdasarkan data yang ditampilkan, pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Jambi menunjukkan cakupan dan jumlah alokasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu.

Di Provinsi Bengkulu, kegiatan BSPS pada delineasi perkotaan dialokasikan di Kota Bengkulu sebanyak 62 unit, sedangkan pada delineasi pesisir di Kabupaten Kaur sebanyak 59 unit. Dengan demikian, total alokasi BPS pada tahun 2025 yang tergambar relatif terbatas.

Sementara itu, di Provinsi Jambi, kegiatan BPS mencakup delineasi perkotaan (Kota Jambi sebanyak 73 unit dan Kota Sungai Penuh sebanyak 146 unit), delineasi perdesaan dengan total 1.040 unit yang tersebar di delapan kabupaten, serta delineasi pesisir sebanyak 268 unit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara keseluruhan, jumlah unit BPS di Provinsi Jambi jauh lebih besar dan memiliki sebaran wilayah yang lebih luas dibandingkan Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.3.1. 1 Capaian Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu

Wilayah	Provinsi Jambi			Provinsi Bengkulu		
Delineasi	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Pesisir	268 Unit	268 Unit	100	59 Unit	59 Unit	100
Perdesaan	1040 Unit	1037 Unit	99,71	-	-	-
Perkotaan	219 Unit	219 Unit	100	62 Unit	62 Unit	100
Total	1527 Unit	1524 Unit	99,90	121 Unit	121 Unit	100

Pada wilayah Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi terdapat selisih 3 unit dari alokasi awal semula 1527 unit terealisasi sebanyak 1524 unit, dikarenakan 3 unit wilayah perdesaan mengundurkan diri dengan alasan tidak mau mengikuti aturan BPS. Hasil kegiatan BPS di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.3.1. 2 Dokumentasi Kegiatan BSPS di Provinsi Jambi

Sumber: Arsip Dokumentasi Monitoring BSPS di Provinsi Jambi

Program Bantuan Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi difokuskan pada penyediaan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat guna meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang sehat, aman, dan memenuhi standar lingkungan. Melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi kawasan kumuh di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, pekerjaan telah mencapai progres 100%. Realisasi progres fisik tercatat sebesar 100% sesuai dengan rencana fisik yang juga ditetapkan sebesar 100%, sehingga tidak terdapat deviasi (0%). Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dan telah selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan.



Progres 100%



Progres 100%



Progres 100%



Progres 100%

Gambar 3.3.1. 3 Dokumentasi Kegiatan BSPS di Provinsi Jambi

Sumber: Arsip Dokumentasi Monitoring BSPS di Provinsi Jambi

Penyelesaian kegiatan secara penuh tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran.



Gambar 3.3.1. 4 Dokumentasi Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Provinsi Jambi

Sumber: Arsip Dokumentasi Monitoring BSPS di Provinsi Jambi

Kegiatan pembangunan Rumah Susun (Rusun) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Provinsi Jambi saat ini menunjukkan progres yang berjalan sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi. Per Desember 2025 Progres fisik mencakup pelaksanaan pekerjaan pembesian bore pile, pembesian *bore pile* dan *pile cap*, pekerjaan galian pondasi, serta pekerjaan bekisting dan *tie beam*

sebagai bagian dari struktur bawah bangunan. Total realisasi fisik mencapai 7,75%.

Dari sisi progres keuangan, pencairan anggaran telah diproses dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 22 Desember 2025 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 23 Desember 2025, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.3.2. Layanan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Layanan Klinik PKP adalah pusat layanan terpadu yang memberikan informasi, bantuan teknis, dan pendampingan terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman layak huni. Klinik ini hadir untuk mendukung masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar dapat mengakses hunian yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Ruang lingkup layanan Klinik PKP yaitu:

- a. Perencanaan Rumah, untuk memberikan konsultasi terkait desain, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proses Perizinan Bangunan Gedung (PBG), serta aspek teknis perencanaan rumah.
- b. Pelaksanaan Konstruksi, untuk membantu masyarakat dalam pemilihan material, penentuan tenaga kerja/tukang, serta aspek teknis pelaksanaan pembangunan.
- c. Pengawasan Konstruksi, untuk memberikan pendampingan dalam pengawasan pembangunan atau perbaikan rumah agar sesuai standar.
- d. Pemanfaatan Rumah, yaitu layanan terkait pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan rumah agar tetap layak huni.
- e. Pendampingan Sosial dan Teknis, untuk membantu masyarakat secara individu maupun kelompok dalam memahami konsep rumah layak huni yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tujuan Klinik PKP yaitu mengukur kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak huni dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan perumahan, meningkatkan keswadayaan masyarakat melalui program pendampingan dan pemberian bantuan teknis, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Singkatnya, Klinik PKP berfungsi sebagai “*one-stop service*” bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, pendampingan, dan solusi teknis terkait perumahan dan permukiman, sehingga dapat memperkuat akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.



Gambar 3.3.2. 1 Grafik Rencana Dan Realisasi Kegiatan Klinik PKP BP3KP Sumatera IV periode Juli sampai dengan Desember

Sumber: Data BP3KP Sumatera IV

Grafik rencana dan realisasi kegiatan Klinik PKP BP3KP Sumatera IV periode Juli sampai dengan Desember menunjukkan bahwa secara kumulatif kinerja layanan telah melampaui target yang ditetapkan. Total target (rencana) layanan tahun 2025 sebesar 800 layanan, sedangkan realisasi mencapai 866 layanan atau sebesar 108,25% dari target. Pada bulan Agustus, realisasi mencapai 102 layanan dari target 100 layanan, kemudian pada September terealisasi 240 layanan dari target 200 layanan. Lonjakan signifikan terjadi pada bulan Oktober dengan realisasi 432 layanan dari target 250 layanan. Meskipun pada bulan November dan Desember

realisasi masing-masing hanya 55 layanan dari target 150 layanan dan 37 layanan dari target 100 layanan, capaian kumulatif tetap melebihi target tahunan karena kontribusi tinggi pada bulan-bulan sebelumnya.



Gambar 3.3.2. 2 Dokumentasi Kegiatan Klinik PKP BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025

Sumber: Arsip Dokumentasi Kegiatan Klinik PKP BP3KP Sumatera IV

Secara keseluruhan, kinerja kegiatan Klinik PKP BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian akhir melampaui target yang telah ditetapkan.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1. Realisasi Anggaran Pada Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Berkenaan dengan realisasi pelaksanaan anggaran per Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BP3KP Sumatera IV mencakup Satker Balai, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi, dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu. Realisasi anggaran BP3KP Sumatera IV Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik baik pada Program Dukman maupun Program PKP. Untuk Program Dukman, total pagu anggaran sebesar Rp2.209.986.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.968.631.364 atau 89,08%, sejalan dengan realisasi fisik yang juga mencapai 89,08%. Secara rinci, Balai P3KP Sumatera IV merealisasikan anggaran sebesar Rp863.041.910 dari pagu Rp935.918.000 (92,21%). Satker PKP Provinsi Bengkulu merealisasikan Rp543.002.099 dari pagu Rp625.831.000 (86,76%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Sementara itu, Satker PKP

Provinsi Jambi merealisasikan Rp562.587.355 dari pagu Rp648.237.000 atau sebesar 86,79%, dengan realisasi fisik 86,79%.

Pada Program PKP, total pagu anggaran sebesar Rp41.662.482.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp40.156.776.902 atau 96,39%. Balai P3KP Sumatera IV mencatat realisasi sebesar Rp1.277.597.103 dari pagu Rp2.148.515.000 (59,46%). Satker PKP Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja sangat optimal dengan realisasi Rp4.160.539.632 dari pagu Rp4.175.871.000 atau 99,63% serta realisasi fisik 100%. Adapun Satker PKP Provinsi Jambi merealisasikan Rp34.718.640.167 dari pagu Rp35.338.096.000 atau 98,25% dengan realisasi fisik mencapai 99,43%. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan tingkat serapan yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera IV.

Tabel 3.4.1. 1 Realisasi Anggaran Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Wilayah Kerja BP3KP Sumatera IV

No	SATUAN KERJA	PROGRAM DUKMAN				PROGRAM PKP			
		PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (%)	PAGU (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp/%)		REALISASI FISIK (%)
1	Balai P3KP Sum IV	935.918.000	863.041.910	92,21	92,21	2.148.515.000	1.277.597.103	59,46	59,46
	SEKRETARIAT JENDERAL	935.918.000	863.041.910	92,21	92,21				
	DIRJEN KP					464.610.000	377.883.946	81,33	81,33
	DIRJEN PERDESAAN					309.072.000	207.738.383	67,21	67,21
	DIRJEN PERKOTAAN					1.071.367.000	393.643.890	36,74	36,74
	DIRJEN TKPR					303.466.000	298.330.884	98,31	98,31
2	Satker PKP Prov Bengkulu	625.831.000	543.002.099	86,76	100	4.175.871.000	4.160.539.632	99,63	100
	SEKRETARIAT JENDERAL	625.831.000	543.002.099	86,76	100				
	DIRJEN KP					2.105.670.000	2.099.897.139	99,73	100
	DIRJEN PERDESAAN					111.627.000	111.627.000	100	100
	DIRJEN PERKOTAAN					1.958.574.000	1.949.015.493	99,63	100
3	Satker PKP Prov Jambi	648.237.000	562.587.355	86.79	86.79	35.338.096.000	34.718.640.167	98.25	99,43
	SEKRETARIAT JENDERAL	648.237.000	562.587.355	86.73	86.79				
	DIRJEN KP					6.031.148.000	5,894.486.517	97.73	100
	DIRJEN PERDESAAN					22.639.507.000	22.418.548.160	99.02	99.16
	DIRJEN PERKOTAAN					6.667.441.000	6.405.605.4990	96.07	100
TOTAL		2.209.986.000	1.968.631.364	89,08	89,08	41.662.482.000	40.156.776.902	96,39	

Sumber: Data Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera IV

Pada DIPA Sekretariat Jenderal, Balai P3KP Sumatera IV memiliki pagu sebesar Rp935.918.000,- dengan realisasi Rp863.041.910,- atau sebesar 92,21%. Satker PKP Provinsi Bengkulu memiliki pagu Rp625.831.000,- dengan realisasi Rp543.002.099,- atau sebesar 86,76%, sedangkan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki pagu Rp648.237.000,- dengan realisasi Rp562.587.355,- atau sebesar 86,79%. Dengan demikian, pada komponen Sekretariat Jenderal, Balai P3KP Sumatera IV tidak hanya memiliki pagu terbesar, tetapi juga persentase realisasi tertinggi dibandingkan kedua satker provinsi. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.4.1. 2.

Tabel 3.4.1. 2 BP3KP Sumatera IV DIPA Sekretariat Jenderal

No	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	Balai P3KP Sumatera IV	935.918.000	863.041.910	92,21%
2	Satker PKP Bengkulu	625.831.000	543.002.099	86,76%
3	Satker PKP Jambi	648.237.000	562.587.355	86,79%

Pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Balai P3KP Sumatera IV memiliki pagu Rp464.610.000,- dengan realisasi Rp377.883.946,- atau sebesar 81,33%. Satker PKP Provinsi Bengkulu mencatat pagu Rp2.105.670.000,- dengan realisasi Rp2.099.897.139,- atau sebesar 99,73%, sedangkan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki pagu Rp6.031.148.000,- dengan realisasi Rp5.894.486.517,- atau sebesar 97,73%. Terlihat bahwa meskipun pagu terbesar berada di Provinsi Jambi, persentase realisasi tertinggi terdapat pada Satker PKP Provinsi Bengkulu.. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.4.1.3.

Tabel 3.4.1. 3 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

No	Satker	Pagu RKAHL	Realisasi	Progres Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	Balai P3KP Sumatera IV	464.610.000	377.883.946	81,33%
2	Satker PKP Bengkulu	2.105.670.000	2.099.897.139	99,73%
3	Satker PKP Jambi	6.031.148.000	5.894.486.517	97,73%

Pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Balai P3KP Sumatera IV memiliki pagu Rp309.072.000,- dengan realisasi Rp207.738.383,- atau sebesar 67,21%. Satker PKP Provinsi Bengkulu memiliki pagu Rp111.627.000,- dengan realisasi Rp111.627.000,- atau mencapai 100%, sedangkan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki pagu Rp22.639.507.000,- dengan realisasi Rp22.418.548.160,- atau sebesar 99,02%. Dengan demikian, pada komponen Perdesaan, realisasi tertinggi secara persentase berada pada Bengkulu (100%), disusul Jambi (99,02%), sementara Balai relatif lebih rendah. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.4.1. 4.

Tabel 3.4.1. 4 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

No	Satker	Pagu RKAHL	Realisasi	Progres Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	Balai P3KP Sumatera IV	309.072.000	207.738.383	67,21%
2	Satker PKP Bengkulu	111.627.000	111.627.000	100%
3	Satker PKP Jambi	22.639.507.000	22.418.548.160	99,02%

Sementara itu, pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Kota), Balai P3KP Sumatera IV memiliki pagu Rp1.071.367.000,- dengan realisasi Rp393.643.890,- atau sebesar 36,74%. Satker PKP Provinsi Bengkulu memiliki pagu Rp1.958.574.000,- dengan realisasi Rp1.949.015.493,- atau sebesar 99,63%, sedangkan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki pagu Rp6.667.441.000,- dengan realisasi Rp6.405.605.499,- atau sebesar 96,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pada komponen Perkotaan, tingkat serapan anggaran tertinggi berada pada Bengkulu, sementara Balai memiliki persentase realisasi paling rendah. Adapun rincian besaran nilai pagu dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.4.1. 5.

Tabel 3.4.1. 5 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

No	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	Balai P3KP Sumatera IV	1.071.367.000	393.643.890	36,74%
2	Satker PKP Bengkulu	1.958.574.000	1.949.015.493	99,63%
3	Satker PKP Jambi	6.667.441.000	6.405.605.499	96,07%

Pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR), Balai P3KP Sumatera IV dengan kode satker 691606 memiliki pagu anggaran sebesar Rp303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Dari pagu tersebut, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp298.330.884,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau mencapai 98,31%. Capaian ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan tata kelola dan pengendalian risiko pada Balai P3KP Sumatera IV telah berjalan

secara efektif, tertib, dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4.1. 6.

Tabel 3.4.1. 6 BP3KP Sumatera IV DIPA Ditjen TKPR

No	Satker	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres Keuangan
		(Rp.)	(Rp.)	%
1	Balai P3KP Sumatera IV	303.466.000	298.330.884	98,31%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Balai P3KP Sumatera IV memiliki pagu terbesar pada komponen Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal) dengan persentase realisasi yang juga relatif tinggi, sedangkan untuk program teknis (Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Perdesaan, dan Perkotaan), pagu terbesar berada pada Satker PKP Provinsi Jambi. Dari sisi persentase realisasi, Satker PKP Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja serapan paling optimal karena hampir seluruh komponen program teknis mencapai di atas 99% bahkan 100%.

3.4.2. Rincian Realisasi Anggaran Pada Satuan Kerja (Satker) Balai

Pembahasan mengenai analisis realisasi anggaran BP3KP Sumatera IV dalam hal ini difokuskan pada DIPA yang berada pada satker Balai. Adapun DIPA yang digunakan sebagai bahan analisis tersebut menggunakan DIPA revisi terakhir. Terdapat lima DIPA yaitu dengan dengan kode satker 691387, 691441, 691495, 691549, dan 691598. Masing – masing DIPA memiliki nilai pagu yang berbeda dengan karakteristik jumlah realisasi keuangan masing-masing. Berikut ini adalah pembahasan mengenai realisasi anggaran pada masing-masing DIPA.

DIPA Sekretariat Jenderal dengan kode satker 691387 memiliki besaran nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 935.918.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

863.041.910,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 92,21%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.2. 1.

Tabel 3.4.2. 1 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Sekretariat Jenderal BP3KP Sumatera IV (691387)

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%KEU	SISA (Rp)
691387	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	935,918,000	863,041,910	92.21	72,876,090
WA	Program Dukungan Manajemen	935,918,000	863,041,910	92.21	72,876,090
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	935,918,000	863,041,910	92.21	72,876,090
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	935,918,000	863,041,910	92.21	72,876,090
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	935,918,000	863,041,910	92.21	72,876,090
7665.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	935,918,000	863,041,910	92.21	72,876,090
7665.EBA.994.002.A	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV	241,634,000	238,604,581	98.75	3,029,419
7665.EBA.994.002.B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	69,600,000	42,396,306	60.91	27,203,694
7665.EBA.994.002.C	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	141,332,000	122,044,771	86.35	19,287,229
7665.EBA.994.002.D	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	260,092,000	242,655,000	93.3	17,437,000
7665.EBA.994.002.E	LAYANAN PERKANTORAN	223,260,000	217,341,252	97.35	5,918,748

Sumber: Progres Keuangan, MyPKP Tahun 2025

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan kode satker 691441 memiliki pagu anggaran sebesar Rp464.610.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp377.883.946,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga

Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 81,33%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.2. 2.

Tabel 3.4.2. 2 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen Kawasa Permukiman BP3KP Sumatera IV (691441)

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%KEU	SISA (Rp)
691441	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	464,610,000	377,883,946	81.33	86,726,054
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	464,610,000	377,883,946	81.33	86,726,054
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	464,610,000	377,883,946	81.33	86,726,054
7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	414,610,000	335,124,886	80.83	79,485,114
7659.FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	84,310,000	59,634,952	70.73	24,675,048
7659.FAE.001.100	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,310,000	59,634,952	70.73	24,675,048
7659.FAE.001.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,310,000	59,634,952	70.73	24,675,048
7659.FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	330,300,000	275,489,934	83.41	54,810,066
7659.FAE.003.100	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	330,300,000	275,489,934	83.41	54,810,066
7659.FAE.003.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	330,300,000	275,489,934	83.41	54,810,066
7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian) [PN]	50,000,000	42,759,060	85.52	7,240,940
7659.PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50,000,000	42,759,060	85.52	7,240,940

7659.PBF.001.100	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50,000,000	42,759,060	85.52	7,240,940
7659.PBF.001.100.A	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP SUMATERA IV	50,000,000	42,759,060	85.52	7,240,940

Sumber: Progres Keuangan, MyPKP Tahun 2025

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan kode satker 691495 memiliki pagu anggaran sebesar Rp309.072.000,- (Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp207.738.383,- (Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 67,21%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.2. 3.

Tabel 3.4.2. 3 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan BP3KP Sumatera IV (691495)

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%KEU	SISA (Rp)
691495	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	309,072,000	207,738,383	67.21	101,333,617
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	309,072,000	207,738,383	67.21	101,333,617
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	309,072,000	207,738,383	67.21	101,333,617
7660.AEA	Koordinasi (kegiatan)	171,176,000	130,165,288	76.04	41,010,712
7660.AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	171,176,000	130,165,288	76.04	41,010,712
7660.AEA.001.100	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	171,176,000	130,165,288	76.04	41,010,712
7660.AEA.001.100.A	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERDESAAN PUSAT DAN DAERAH	171,176,000	130,165,288	76.04	41,010,712
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	137,896,000	77,573,095	56.25	60,322,905
7660.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	137,896,000	77,573,095	56.25	60,322,905
7660.FAE.005.100	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	137,896,000	77,573,095	56.25	60,322,905

	Perdesaan				
7660.FAE.005.100.A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	137,896,000	77,573,095	56.25	60,322,905

Sumber: Progres Keuangan, MyPKP Tahun 2025

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan kode satker 691549 memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.071.367.000,- (Satu Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp393.643.890,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 36,74%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.2. 4.

Tabel 3.4.2. 4 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan BP3KP Sumatera IV (691549)

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%KEU	SISA (Rp)
691549	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	1,071,367,000	393,643,890	36.74	677,723,110
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,071,367,000	393,643,890	36.74	677,723,110
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,071,367,000	393,643,890	36.74	677,723,110
7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	850,425,000	298,482,595	35.1	551,942,405
7661.ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	366,720,000	212,615,666	57.98	154,104,334
7661.ABF.001.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan dan Strategi, serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	366,720,000	212,615,666	57.98	154,104,334
7661.ABF.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat - Daerah	366,720,000	212,615,666	57.98	154,104,334
7661.ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	201,809,000	0	0	201,809,000
7661.ABF.004.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	201,809,000	0	0	201,809,000

7661.ABF.004.100.A	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	201,809,000	0	0	201,809,000
7661.ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	281,896,000	85,866,929	30.46	196,029,071
7661.ABF.005.100	Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	281,896,000	85,866,929	30.46	196,029,071
7661.ABF.005.100.A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	281,896,000	85,866,929	30.46	196,029,071
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	220,942,000	95,161,295	43.07	125,780,705
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	220,942,000	95,161,295	43.07	125,780,705
7661.FAE.001.100	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	220,942,000	95,161,295	43.07	125,780,705
7661.FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	220,942,000	95,161,295	43.07	125,780,705

Sumber: Progres Keuangan, MyPKP Tahun 2025

Sementara itu, DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) dengan kode satker 691598 memiliki pagu anggaran sebesar Rp303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp298.330.884,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 98,31%. Secara lebih rinci realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.2. 5.

Tabel 3.4.2. 5 Realisasi Anggaran Balai Pada DIPA Ditjen TKPR BP3KP Sumatera IV (691598)

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%KEU	SISA (Rp)
691598	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	303,466,000	298,330,884	98.31	5,135,116
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	303,466,000	298,330,884	98.31	5,135,116
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	303,466,000	298,330,884	98.31	5,135,116

7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	303,466,000	298,330,884	98.31	5,135,116
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129,233,000	124,928,409	96.67	4,304,591
7662.ABF.004.100	Penyusunan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129,233,000	124,928,409	96.67	4,304,591
7662.ABF.004.100.D	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI P3KP SUMATERA IV	129,233,000	124,928,409	96.67	4,304,591
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	174,233,000	173,402,475	99.52	830,525
7662.ABF.005.100	Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko	174,233,000	173,402,475	99.52	830,525
7662.ABF.005.100.A	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	174,233,000	173,402,475	99.52	830,525

Sumber: Progres Keuangan, MyPKP Tahun 2025

Secara umum, capaian realisasi tertinggi terdapat pada DIPA Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sedangkan realisasi terendah terdapat pada DIPA Perumahan Perkotaan.

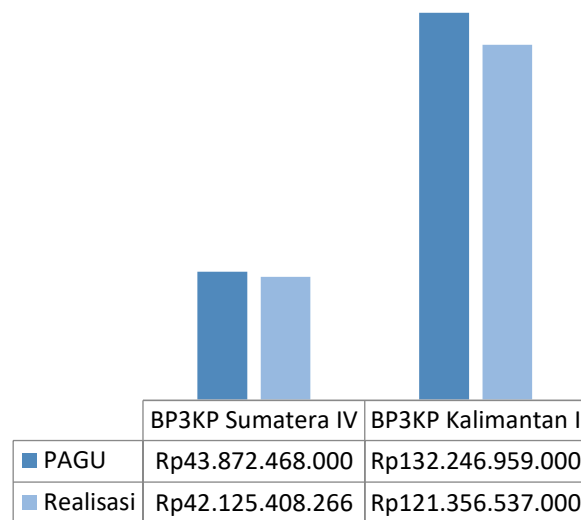
3.5. Analisis Perbandingan Kinerja

Dalam pembahasan ini, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV mencoba melakukan analisis perbandingan kinerja terhadap BP3KP Kalimantan I dalam hal realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu yang dimiliki oleh masing – masing balai untuk tahun anggaran 2025. Pada Tabel 3.5. 1. dapat dilihat realisasi pelaksanaan anggaran per Satuan Kerja (Satker) BP3KP Kalimantan I yang mencakup anggaran Satker Balai, Satker Penyediaan Perumahan Kalimantan Barat, dan Satker Penyediaan Perumahan Kalimantan Tengah. Berikut dengan rincian besaran pagu hingga realisasi dan persentase keuangan yang dikelompokkan per Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bawah unit organisasi.

Tabel 3.5. 1 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per Satuan T.A. 2025 BP3KP Kalimantan I

NO	KODE	SATUAN KERJA	UNOR	PAGU (Rp Ribu)			REALISASI (Rp Ribu)			%
				Barang	Modal	Total	Barang	Modal	Total	
1	691409	Balai	SETJEN	1.073.888	0	1.073.888	945.223	0	945.223	88,02
2	691410	PKP Kalbar	SETJEN	617.919	0	617.919	536.85	0	536.85	86,88
3	691411	PKP Kalteng	SETJEN	660.469	0	660.469	604.65	0	604.65	91,55
4	691463	Balai	DITJEN K.P.	535.508	0	535.508	341.718	0	341.718	63,81
5	691464	PKP Kalbar	DITJEN K.P.	41.151.876	0	41.151.876	37.066.150	0	37.066.150	90,07
6	691465	PKP Kalteng	DITJEN K.P.	688.502	0	688.502	658.774	0	658.774	95,68
7	691517	Balai	DITJEN PERUM. PERDESAAN	498.538	0	498.538	324.809	0	324.809	65,15
8	691518	PKP Kalbar	DITJEN PERUM. PERDESAAN	40.142.318	0	40.142.318	35.001.304	0	35.001.304	87,19
9	691519	PKP Kalteng	DITJEN PERUM. PERDESAAN	13.795.471	0	13.795.471	13.744.933	0	13.744.933	99,63
10	691571	Balai	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	1.181.193	0	1.181.193	798.688	0	798.688	67,62
11	691572	PKP Kalbar	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	5.803.449	0	5.803.449	5.520.992	0	5.520.992	95,13
12	691573	PKP Kalteng	DITJEN PERUM. PERKOTAAN	6.327.698	19.466.664	25.794.362	6.080.457	19.461.364	25.541.821	99,02
13	691606	Balai	DITJEN TKPR	303.466	0	303.466	270.625	0	270.625	89,18
TOTAL				112.780.295	19.466.664	132.246.959	101.895.173	19.461.364	121.356.537	91,77

Berdasarkan data pada realisasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 dapat dibuat suatu analisis perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran antara BP3KP Sumatera IV dan BP3KP Kalimantan I. Pada Program Dukungan Manajemen dari Sekretariat Jenderal Satuan Kerja BP3KP Sumatera IV memiliki PAGU Rp. 935.918.000 dengan realisasi Rp. 863.041.910 atau sebesar 92,21%, sedangkan pada Balai P3KP Kalimantan I memiliki PAGU Rp. 1.073.888.000 dengan realisasi Rp. 945.223.000 atau 88,02%. Untuk keseluruhan Satuan Kerja pada Balai P3KP Sumatera IV mendapatkan PAGU sebesar Rp. 43.872.468.000 dengan realisasi sebesar Rp. 42.125.408.266 atau sebesar 96,01%. Pada keseluruhan Satuan Kerja Balai P3KP Kalimantan I mendapatkan PAGU lebih besar dibanding BP3KP Sumatera IV yaitu Rp. 132.246.959.000 dengan realisasi Rp. 121.356.537.000 atau 91,77%.



Gambar 3.5. 1 Grafik Perbandingan Komposisi Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP3KP Sumatera IV dan BP3KP Kalimantan I

BP3KP Sumatera IV memiliki PAGU yang lebih kecil dibanding BP3KP Kalimantan I dan secara persentase realisasi lebih besar, namun kedua Balai sudah mencapai realisasi yang baik karena lebih dari 90%.

3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, dan Anggaran.

3.6.1 Analisis Atas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diperlukan pembaruan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta tata laksana. Dalam konteks penataan kelembagaan, manajemen kepegawaian, perencanaan pendidikan dan pelatihan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, klasifikasi jabatan, hingga fungsi pengawasan, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebagai Unit Organisasi (Unor) koordinator utama di lingkungan Kementerian

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyusun Anjab dan ABK guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2025, sebagai kementerian yang baru terbentuk, Kementerian PKP menetapkan enam unit kerja eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR). Selain itu, terdapat 19 Balai yang membawahi 38 Satuan Kerja (Satker) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, muncul sejumlah jabatan baru sebagai hasil proses analisis jabatan. Pada level struktural, jabatan baru yang dibentuk antara lain Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I, dan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Pembentukan jabatan-jabatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dan manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan, khususnya pada 19 Balai yang cakupan kerjanya meliputi 38 provinsi di seluruh Indonesia.

3.6.2. Analisis Atas Sarana dan Prasarana, serta Anggaran

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, selama berjalannya tahun anggaran 2025, Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV selalu memanfaatkan kemudahan teknologi dalam hal rapat koordinasi baik di dalam lingkungan Direktorat teknis maupun bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan untuk rapat secara daring yaitu menggunakan aplikasi *Zoom Workspace* dan/atau aplikasi *Microsoft Teams*. Penggunaan sumber daya sarana/prasarana ini sangat membantu dalam efisiensi penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang digunakan dapat diarahkan untuk kegiatan yang lebih terarah dan lebih optimal.

Beberapa kegiatan rapat secara daring (virtual) yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi penggunaan sarana/prasarana

dan/atau anggaran sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya di antaranya yaitu:

- a. Sosialisasi Peraturan Menteri PKP berkaitan dengan Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, serta yang berkaitan dengan kegiatan teknik maupun non – teknis lainnya;
- b. Sosialisasi Penggunaan *e-office* dan Presensi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal.
- c. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA pada masing – masing Unit Organisasi;
- d. Bimbingan Teknis berkaitan dengan persiapan pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- e. Bimbingan Teknis berkaitan dengan pelaksanaan *Qualitative Scoring* persiapan maupun pasca pelaksanaan pembangunan Rumah Susun;
- f. Rapat Koordinasi Internal Persiapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) BP3KP Sumatera IV;
- g. Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI dan Manajemen Risiko (MR);
- h. Pelaksanaan Pelatihan Analisis MR secara daring sebelum dilaksanakan Ujian Sertifikasi;
- i. Rapat secara *hybrid* (daring dan luring) dalam hal sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Pembiayaan Perumahan (KPP) dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, maupun kegiatan lainnya;
- j. Rapat Koordinasi Likuidasi BMN ex Direktorat Jenderal Perumahan;
- k. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara (BMN);
- l. Pelatihan secara mandiri *MOOC* pada layanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); serta
- m. Kegiatan lainnya yang menggunakan rapat virtual/daring.

Optimalisasi dalam rangka efisiensi pun juga dilakukan dengan mengurangi penggunaan kertas untuk pelaporan, dengan kata lain hampir sebagian besar dokumen memanfaatkan teknologi digital, berupa scan atau data – data digital lain dalam hal sharing data kepada instansi lain (pusat atau pemerintah daerah) dan kebutuhan arsip digital yang juga dilakukan dengan aplikasi seperti *Google Drive*, maupun *Microsoft OneDrive*, serta aplikasi pendukung lainnya

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Aplikasi *MyPKP* dengan alamat situs <https://my.pkp.go.id/>. Aplikasi ini memiliki banyak layanan fitur, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan yaitu:

- a. Fitur presensi sebagai pelaporan bukti kehadiran yang berpengaruh ada kinerja pegawai.
- b. Integrasi dengan <https://eoffice.pkp.go.id/> yang merupakan layanan *history* presensi, naskah dinas seperti persuratan, pengajuan izin/cuti, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang mendapat disposisi dari pimpinan.
- c. Fitur layanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) termasuk di dalamnya penyusunan SKP dan pengunggahan dokumen SKP seperti bukti dukung hasil kinerja sebelum dilakukan penilaian kinerja.
- d. Fitur layanan Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik kegiatan. Pada fitur ini lebih difokuskan pada pengisian dan pemantauan data pemaketan kegiatan beserta nilai pagu yang melekat pada kegiatan tersebut. Kemudian dilakukan pengisian progres realisasi fisik berdasarkan realisasi nyata secara berkala sebagai upaya pelaporan terintegrasi.
- e. Fitur layanan Pembangunan ZI. Fitur ini lebih mengarah pada pengunggahan dokumen bukti dukung sebagai pelaporan upaya pembangunan ZI khususnya di lingkungan BP3KP Sumatera IV.
- f. Pelaporan *Summary* dan Detail Data Tiga Juta Rumah, merupakan fitur pelaporan data capaian 3 juta rumah dengan status capaian masing – masing kabupaten/kota khususnya di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.

Aplikasi *MR.PKP* dengan alamat situs <https://pkp.jentrik.net/backend/>, merupakan situs yang digunakan sebagai wadah untuk penyusunan Komitmen MR yang mencakup Pengisian Profil Balai termasuk Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko, Penyusunan Sasaran Tujuan, Daftar Pemangku Kepentingan, Penyusunan Profil Risiko Umum, Profil Risiko Korupsi, hingga jadwal pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Di dalam nya juga terdapat fitur untuk mengunggah dokumen sebagai bukti dukung pemantauan Pengendalian Risiko. Meskipun situs yang digunakan masih *dummy* belum terintegrasi dengan aplikasi *MyPKP*, namun fitur yang dihadirkan cukup lengkap dan tertata dengan baik.

Layanan data *cloud*/penyimpanan data secara digital, seperti *Google Drive* dan/atau *Microsoft OneDrive* sebagai wadah untuk mengunggah laporan *soft – file* yang diminta oleh pusat berkaitan dengan pelaporan dokumen-dokumen seperti:

- a. Perjanjian Kinerja;
- b. Rencana Strategis 2025-2029;
- c. Rencana Aksi 2025/2026/2027/2028/2029;
- d. Laporan Kinerja Triwulan;
- e. Laporan Kinerja Tahunan / LAKIP;
- f. Laporan bukti dukung capaian kegiatan;
- g. Laporan BMN;
- h. Laporan Keuangan.

Aplikasi *SIMAN* sebagai wadah untuk penyusunan laporan wasdal BMN, yang kemudian dicetak dan ditandatangani kemudian diunggah kembali pada aplikasi tersebut yang terintegrasi dengan pusat.

3.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan perkantoran, keberhasilan maupun kegagalan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian faktor yang saling berkaitan. Anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan program kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor – faktor yang mendukung keberhasilan serta penyebab kegagalan menjadi krusial agar setiap kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

3.7.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumber faktornya, yaitu dari sisi internal dan dari sisi eksternal, dengan penjelasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7.1. 1.

Tabel 3.7.1. 7 Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor Pendukung Keberhasilan dari sisi Internal	
1	Telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
2	Penyusunan perencanaan anggaran dilakukan secara rasional dan proporsional, menyesuaikan kebutuhan serta skala prioritas program dan kegiatan, khususnya di lingkungan BP3KP Sumatera IV.
3	Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja balai maupun satker.
4	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan serta pengelolaan dokumentasi kegiatan.
5	Adanya kapasitas organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan kebijakan serta dinamika kondisi di lapangan.
Faktor Pendukung Keberhasilan dari sisi Eksternal	
1	Peran aktif Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam melakukan pendampingan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.
2	Terjalinnya koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat melalui BP3KP Sumatera IV dan Satker PKP Provinsi Bengkulu serta Satker PKP Provinsi Jambi dengan Penyedia Jasa, para pemangku kepentingan, serta masyarakat penerima manfaat.
3	Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta keberlanjutan pemeliharaan rumah susun.
4	Dukungan dari Unit Organisasi terkait, yaitu Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan, dalam memberikan arahan, kebijakan, serta sosialisasi program, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

3.7.2. Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa faktor penyebab kegagalan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumber faktornya, yaitu dari sisi internal dan dari sisi eksternal, dengan penjelasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7.2. 1.

Tabel 3.7.2. 1 Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor Penyebab Kegagalan dari sisi Internal	
1	Belum tersusunnya proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BP3KP Sumatera IV yang dapat dijadikan pedoman dalam alur pelaksanaan program dan kegiatan.
2	Penyusunan profil risiko belum optimal karena keterbatasan keterlibatan pegawai yang telah memiliki pelatihan dan kompetensi di bidang analisis manajemen risiko.
3	Koordinasi internal belum berjalan secara intensif, sehingga diperlukan peningkatan frekuensi dan kualitas koordinasi antara balai dan satker, khususnya dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi guna mengidentifikasi permasalahan serta menyepakati langkah tindak lanjut.
4	Sinergi antar fungsi, baik teknis, administrasi, maupun pelaporan, masih perlu diperkuat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
5	Jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan di lingkup BP3KP Sumatera IV.
Faktor Penyebab Kegagalan dari sisi Eksternal	
1	Ketersediaan data awal yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir pada beberapa lokasi sasaran kegiatan di wilayah BP3KP Sumatera IV.
2	Tingkat aksesibilitas wilayah yang relatif sulit di sejumlah daerah akibat kondisi geografis pada cakupan wilayah kerja Sumatera IV.
3	Faktor cuaca dan kondisi iklim yang berpotensi memengaruhi jadwal serta progres pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
4	Partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang belum merata di seluruh lokasi sasaran program.
5	Jarak antar lokasi kegiatan yang cukup berjauhan sehingga berdampak pada efektivitas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
6	Adanya potensi kondisi darurat atau kejadian tidak terduga, seperti bencana alam maupun gangguan lingkungan lainnya, yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program.



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan kebijakan, sosial – demografi, ekonomi – pembiayaan, lingkungan – tata ruang, serta tata kelola kelembagaan yang saling berinteraksi. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui intervensi pada peningkatan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, penguatan tata kelola, serta dukungan manajemen. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjamin keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan mencakup penguatan kebijakan dan perencanaan melalui sinkronisasi lintas sektor dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana Strategis (Renstra), pengembangan inovasi pembiayaan perumahan melalui skema subsidi dan kemitraan dengan swasta, serta optimalisasi sumber daya dengan strategi pengadaan material yang efisien. Selain itu, integrasi aspek lingkungan dan mitigasi risiko bencana harus menjadi bagian dari penataan kawasan, disertai penguatan tata kelola melalui transparansi, monitoring, dan evaluasi kinerja. Pendekatan inklusif dan partisipatif juga perlu diterapkan dengan melibatkan masyarakat lokal dan memperhatikan keberagaman budaya. Secara lebih spesifik, tindak lanjut program telah mencakup pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun atau meningkatkan kualitas rumah, pembangunan rumah susun sebagai solusi hunian layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, penanganan kawasan kumuh secara terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta peningkatan kualitas sanitasi rumah guna mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan hunian. Dengan demikian, rekomendasi ini menjadi arah komprehensif untuk memastikan

keberhasilan program perumahan dan permukiman, sekaligus menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu.

Berikut ini beberapa sub pembahasan berkaitan dengan kendala/permasalahan dan saran dari sudut pandang BP3KP Sumatera IV, dan terobosan atau usulan BP3KP Sumatera IV.

4.1.1. Kendala/Permasalahan dan Saran

Kendala dan Permasalahan dari sudut pandang Satuan Kerja (Satker) Balai selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (T.A) 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1.1. 1 Kendala/Permasalahan dan Saran

No	Kendala/Permasalahan	Saran
A	Umum	
1	Kantor BP3KP Sumatera IV masih milik Pemprov Jambi dengan system pinjam pakai, sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan luasan Gedung dalam rangka menunjang aktivitas perkantoran	Perlunya pengadaan tanah untuk persiapan Pembangunan kantor Balai dan Satker dalam mendukung kinerja balai.
2	Kurangnya ruang untuk penyimpanan arsip pada BP3KP Sumatera IV	Perlunya tambahan anggaran untuk sewa gudang arsip, BP3KP Sumatera IV
3	Anggaran tidak terserap secara optimal	• DIPA sebaiknya segera terbit di awal tahun anggaran • Apabila ada pergantian pejabat perbendaharaan, sebaiknya dilaksanakan di awal tahun anggaran. • Sebaiknya perlu penambahan personil pembantu bendahara, mengingat terdapat 5 (lima) DIPA pada satu balai.
4	Sebaran CPB pada program BSPS	Perlunya pengadaan sewa

	sangat luas dan jauh	Kendaraan Dinas Operasional bagi PPK di lingkungan satker provinsi.
5	Belum adanya website KLINIK-PKP	Perlu pengadaan Kembali website KLINIK PKP untuk Balai
B BSPS		
1	Kesulitan dalam memverifikasi persyaratan minimal 3 tahun keterhunian rumah sebelum ditetapkan sebagai CPB	Perlunya kejelasan ketentuan dalam Juknis yang menentukan bukti dukung untuk menyatakan keterhunian minimal 3 tahun, atau dilakukan penyederhanaan terkait ketentuan tersebut.
2	Sebaran data CPB yang tidak merata dan berdampak pada penentuan KPB dengan kendala jarak tempuh antar desa	Alokasi data CPB perlu di kluster terlebih dahulu dari pusat dalam memenuhi ketentuan minimal 10 CPB dalam 1 Desa
3	Banyaknya data CPB yang belum terdaftar dalam DTSEN	Perlunya pemadanan data terlebih dahulu sebelum di input ke dalam SIBARU
4	Keterbatasan waktu pada tahap verifikasi CPB, Rekrutmen TFL dan Pemilihan Toko Terbuka (PTT)	Perlunya alokasi tambahan waktu untuk setiap tahap kegiatan
5	Desa Tanjung Baru Kec. Bahar Selatan 9 unit terjadi keterlambatan karena pengiriman batu bata, semen, kerikil dan handel pintu berangsur dan Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar 1 unit belum 100% karena ada keterlambatan pengiriman daun pintu jendela.	Mengantisipasi permasalahan tersebut, telah dilakukan koordinasi secara intensif ke toko penyedia bahan bangunan dengan membuat surat pernyataan untuk percepatan pengiriman material ke penerima bantuan.
6	Desa Berkun 20 unit, Merubung 9 unit dan Napal Melintang 10 unit belum 100% karena terkendala keterlambatan pengiriman material batu bata karena pengiriman terkendala hujan dan jalan yang tidak memungkinkan karena cuaca sering hujan dan jalan tidak laik jalan.	Koordinasikan ke toko penyedia bahan bangunan bersangkutan untuk segera mengirimkan material jika kondisi cuaca memungkinkan dan jalan sudah ada perbaikan dari pemda setempat.

4.1.2. Terobosan atau Usulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV

Beberapa terobosan atau usulan yang ingin dicapai oleh BP3KP Sumatera IV sekaligus sebagai dorongan bagi kebijakan di level Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yaitu sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan peran dan eksistensi balai serta satker melalui koordinasi aktif dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan program PKP.

b. Penguatan Tata Kelola dan Zona Integritas (ZI)

Mendorong penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, serta penguatan komitmen anti penyuapan guna mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

c. Optimalisasi Pelaksanaan Program Perumahan

Mengoptimalkan bantuan Rumah Susun, Rumah Khusus, BSPS, dan PSU melalui sosialisasi pedoman, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi berkala.

d. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelaporan, dokumentasi, dan pengendalian kegiatan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja.

e. Pengembangan SDM dan Sinergi Internal

Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan serta memperkuat koordinasi antar fungsi teknis, administrasi, dan pelaporan.

f. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi kendala dan memastikan tindak lanjut yang cepat dan tepat.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*).

Plan), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang. Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam program pembangunan rumah layak huni di tahun berikutnya, yakni:

- a. Menjaga lini masa pekerjaan program rumah swadaya sehingga tidak menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Triwulan IV tahun anggaran berjalan yang berpotensi tidak bisanya ditetapkan penerima bantuan pengganti ketika terdapat penerima bantuan yang mengundurkan diri;
- b. Perlu adanya kolaborasi masif antar *stakeholder* guna mendukung satu basis data yang akurat dan aktual sehingga mempercepat proses verifikasi penerima bantuan perumahan;
- c. Perlu adanya transparansi terkait prioritas pembangunan bantuan perumahan sehingga ketika pemerintah daerah/*stakeholder* mengajukan bantuan dapat mengetahui urutan prioritas penerima bantuan di tahun berjalan.